

**AFILIASI KADER HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM  
(HMI) CABANG GOWA RAYA DALAM PARTAI POLITIK**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik pada  
Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik  
UIN Alauddin Makassar

Oleh

**DEDI KUSNADI THAMIN**

**NIM. 30600111030**

**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS USHULUDDIN FILSAFAT DAN POLITIK  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2018**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dedi Kusnadi Thamin  
NIM : 30600111030  
Jurusan/Prodi : Ilmu Politik  
Program Studi : S1  
Fakultas : Ushuluddin Filsafat Dan Politik  
Judul Skripsi : Afiliasi Kader Himpunan Mahasiswa Islm (HMI) cabang Gowa Raya dalam Partai Politik.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI GOWA, 08 Mei 2019 M

Yang menyatakan



**Dedi Kusnadi Thamin**  
**NIM: 30600111030**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Afiliasi Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya" yang disusun oleh Dedi Kusnadi Thamin, Nim 30600111030, mahasiswa jurusan ilmu politik pada fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari jum'at, tanggal 20 April 2018, bertepatan dengan 4 Sya'ban 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu politik (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 08 Mei 2019 M  
03 Ramadhan 1440 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua sidang	: Prof. Dr. H. Muh Natsir, M.A	(.....)
Sekretaris	: Ismah Tita Rusli, S.IP., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Syahrir Karim, M.Si., Ph.D	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP., M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Ismah Tita Rusli, S.IP., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Muhammad Ridha, S.Hi., M.Si	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik

UIN Alauddin Makassar, ✓



Prof. Dr. H. Muh Natsir, M.A  
NIP. 19590741989031003

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam dihaturkan kepada nabi Muhammad saw, bersama seluruh keluarga dan para sahabatnya, semoga selalu tercurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Penulisan skripsi ini yang berjudul :” *Afiliasi Kader Himpunan Mahasiswa Islm (HMI) cabang Gowa Raya dalam Partai Politik*. dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini mengalami banyak kesulitan. Namun, berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis merasa perlu menghaturkan terima kasih kepada :

1. Prof.Dr.H.Musafir,M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar beserta segenap stafnya yang telah mencurahkan perhatian dalam memajukan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Prof.Dr.H.Muh.Natsir,MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Filsafat, dan Politik. Dr.Tasmin,M.Ag selaku Dekan I, Dr.Mahmuddin selaku Dekan II, serta Dr.Abdullah, M.Ag., selaku Dekan III.
3. Syahrir Karim,M.Si,Ph.D, selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Kemudian Ismah Tita Rusli S.IP,M.Si selaku sekretaris jurusan Ilmu Politik sekaligus pembimbing

- I, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Muh.Ridha S.HI,MA. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  5. Jajaran dosen Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, yang telah membimbing dan memandu proses pembuatan skripsi ini maupun perkuliahan sehingga memperluas wawasan keilmuan penulis.
  6. Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik beserta segenap stafnya yang telah menyiapkan literatur dan memberikan kemudahan untuk dapat memanfaatkan fasilitas Perpustakaan secara maksimal demi penyelesaian skripsi ini.
  7. Para Staf dan Tata Usaha dilingkungan Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi penulis.
  8. Kedua orang tua penulis, ayahanda Haeruddin dan Ibunda Supiati, juga kepada Kakanda Suhardi, Kakanda Zulkifli, Kakanda Herawati. Terima kasih atas do'a, dan kasih sayang serta motivasi dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama penulis melaksanakan studi dan saat menyusun skripsi ini.
  9. Pengurus HMI Cabang Gowa Raya, Pengurus Komisariat Ushuluddin filsafat dan Politik, Gerakan Mahasiswa Politik (GMP), Konsultan Mahasiswa Politik (KMP), Kawan-Kawan di Lembaga Pers LAPMI Komisariat Ushuluddin, Filsafat dan Poltiik. serta Kawan-Kawan SIMPOSIUM yang telah memotivasi, membantu dan menyalurkan ilmunya kepada penulis.
  10. Kakanda Muh.Rizal, Feri Herianto, Tri Susbianto Dg. Muang, Takwa Bahar yang telah memotivasi, membantu dan menyalurkan ilmunya kepada penulis.

11. Saudara-saudara jurusan Ilmu Politik angkatan 2011 (Ibnu Mundzir, Hardiansyah Hasanuddin, Ahkam, Rahman, Ahmad Fattawari, Reski Silviana Amir) yang selalu memberikan bantuan, serta motivasi untuk selalu berpacu dengan mereka, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini.
12. Segenap Adik-adik , Hamdi Farisa, Muh.Syahrul Maro, Sultan, Muh. Aswar, Nawir, Firmanullah, Syogi Jordan, Andi Eka Saputri, Cici, Panjul, Fadil Rahmat Irfani, Ita, Ramlah, Eval, Ifal, Edi, Kamal, Petrus, Hamdan, Deni, dan Pandi yang selama penulisan skripsi ini telah memberikan bantuan, motivasi, dukungan kepada penulis untuk memaksimalkan dan menyelesaikan skripsi ini.
13. Kemudian ucapan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini yang tak sempat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah. Billahi Taufik Walhidayah, Yakusa !

Gowa, 8 Oktober 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Dedi Kusnadi Thamin**  
**NIM: 30600111030**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	xi
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1-13
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Fokus Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
BAB II TINJAUAN TEORITIK	
14-25	
A. Teori	
14	
1. Teori <i>Patronase</i>	
16	
2. Teori Organisasi	
17	

3. Konsep Tentang Motivasi

20

B. Kerangka Konseptual

25

BAB III METODE PENELITIAN

26-30

A. Lokasi Penelitian

B. Jenis Penelitian

26

C. Sumber Data Penelitian

26

D. Instrumen Penelitian

27

E. Teknik Pengolahan Data

27

F. Teknik Analisis Data

30

BAB IV PEMBAHASAN

32-65

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

32

1. Sejarah HMI

31

2. Visi dan Misi

36

3. Independensi Perspektif HMI

37

4. Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI sebagai Warisan Intelektual

Cak Nur

41



5. Profil HMI Cabang Gowa Raya	45
B. Bentuk Afiliasi Kader HMI Cabang Gowa Raya di Partai Politik Sulawesi Selatan	49
1. Afiliasi Informal Kader HMI cabang Gowa Raya dengan Partai Politik	49
2. Pemetaan Persepsi Afiliasi Informal Kader HMI Cabang Gowa Raya Berdasarkan Ideologi Partai	56
C. Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Kader HMI Cabang Gowa Raya untuk bergabung di Partai Politik	59
1. Insentif Material	59
2. Insentif Solidaritas	62
3. Insentif Idealisme	64

## BAB V PENUTUP

66-68

### A. Kesimpulan

66

### B. Implikasi

68

## DAFTAR PUSTAKA

69

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

71

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

79

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Nama Figur Penting Terbentuknya HMI cabang Gowa Raya

45

Tabel 4.2 Daftar Nama Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya

46

Tabel 4.3 Susunan Pengurus HMI Cabang Gowa Raya periode 2017/2018

39

Tabel 4.4 Partai Politik Berideologi Islam yang diikuti oleh Kader HMI cabang  
Gowa Raya

57

Tabel 4.5 Partai Politik yang diikuti oleh Kader HMI cabang Gowa Raya

59



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Konseptual

25



## ABSTRAK

**Nama** : Dedi Kusnadi Thamin  
**NIM** : 3060011130  
**Judul** : **Afiliasi Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya Dalam Partai Politik.**

---

Penelitian ini membahas tentang afiliasi kader HMI Cabang Gowa Raya pada Partai Politik, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori patronase, teori organisasi dan konsep motivasi, penelitian ini berlangsung diadakan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan fokus pada kader HMI cabang Gowa Raya yang saat ini berkecimpung pada beberapa partai politik di Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk Afiliasi Kader HMI Cab.Gowa Raya di Partai Politik Sulawesi Selatan yaitu berupa pola afiliasi informal sebab dalam praktik berorganisasi yang dijalankan oleh HMI Cabang Gowa Raya tidak terdapat afiliasi yang secara jelas melibatkan kader HMI dengan partai politik tertentu, Secara institusional peneliti tidak menemukan bukti kongkrit yang melibatkan HMI Cabang Gowa Raya dalam menjalin kesepakatan tertentu yang menuntun HMI Cabang Gowa Raya untuk mengambil tindakan dan berpihak pada Keputusan politik tertentu. Fenomena Afiliasi Informal yang terjalin semakin dapat dilihat sebagai konsekuensi keberadaan HMI dan partai politik pada kepentingan yang sama. Afiliasi informal ini terjadi disebabkan oleh 2 landasan, yaitu landasan Senioritas dan Landasan Orientasi HMI. Faktor-faktor yang melatar belakangi Kader HMI untuk bergabung di Partai Politik yaitu : Faktor Insentif Material, keterlibatan kader HMI Cabang Gowa Raya di partai politik untuk membangun relasi dengan mempertimbangkan kesamaan latar belakang organisasi (HMI) sebagai basis untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

Implikasi : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang terkait dalam skripsi tersebut agar kader HMI, Alumni HMI serta Partai Politik untuk melakukan sinergi agar cita-cita HMI dan Partai Politik dapat berjalan dengan maksimal dan dapat diaktualisasikan.

Kata Kunci : *Afiliasi Informal, Kader HMI.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Manusia-manusia berkualitas dapat muncul darimana saja. Bisa di desa dari kelompok petani dan pengembala : atau dikota dari keluarga aristokrat dan pengusaha. Siapapun mereka, tentunya lahir dari bibit serta proses penempaan (aktualisasi potensi) berkesinambungan. Disamping peran keluarga, negara juga bertanggung jawab mendidik warganya. Tidak hanya agar pengetahuannya luas tetapi juga untuk memiliki seperangkat mentalitas ilahiyah dalam kerja dan pengabdian.<sup>1</sup>

Karakter bangsa mesti dibangun sejak dini sampai kejenjang tertinggi, level formal pengajaran terakhir ada di perguruan tertinggi. Pada saat inilah anak didik mengalami dinamika personal yang tinggi. Periode mahasiswa merupakan masa pembentukan profesionalisme keilmuan serta pencarian jati diri. Dari proses inilah terbentuk watak independensi bahkan jiwa *pragmatis*.<sup>2</sup>

Dalam sejarah perjalanan kemahasiswaan, mahasiswa selalu hadir tidak sekedar sebagai saksi dari perubahan tetapi juga aktif dalam memaknai perubahan tersebut. Sejarah juga mencatat dengan tinta emas betapa mahasiswa Indonesia selalu menjadi pelopor dalam pembaharuan dan perjuangan.<sup>3</sup> Setiap aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat Misalnya, kebangkitan nasional pada tahun 1908,

---

<sup>1</sup>Said Muniruddin, *Bintang Arasy, Tafsir Filosofis-Gnostik Tujuan HMI* (Syiah Kuala University Pres) h.11.

<sup>2</sup>Said Muniruddin, *Bintang Arasy, Tafsir Filosofis-Gnostik Tujuan HMI*,h.12.

<sup>3</sup>Syahrir, *Pilihan Angkatan Muda, Menunda Atau Menoleh Kekalahan* (Cet. I: Yogyakarta;Prisma), h .3.

sumpah pemuda pada tahun 1928, proklamasi pada tahun 1945 dan kebangkitan orde baru 1966.

Pola pergerakan mahasiswa mulai dari mahasiswa angkatan tahun 1908, 1928, 1945, 1966, 1977 dan mahasiswa angkatan 1978, baik yang berhasil dalam aksinya maupun yang kurang berhasil selalu berorientasi pada perubahan *status quo* ke suatu situasi baru setidaknya-tidaknya mengundang harapan baru pula.<sup>4</sup>

Kondisi Pemerintahan yang tidak stabil pasca Kemerdekaan Republik Indonesia adalah kondisi yang menyebabkan Himpunan Mahasiswa Islam (selanjutnya disingkat HMI) di saat perang untuk mempertahankan kemerdekaan dimana seluruh bangsa berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat dan mahasiswa bersatu untuk melawan imperialisme Belanda. Lahirnya HMI tidak terlepas dari hukum proses masyarakat, yaitu adanya differensiasi dengan integrasinya di dalam masyarakat setelah melalui masa-masa agresi. Himpunan Mahasiswa Islam ini berperan sebagai organisasi perjuangan.<sup>5</sup>

Misi perjuangan HMI yang lahir berkat kondisi bangsa dan semangat pemuda saat itu menjadi refleksi perjuangan HMI. Saat ini, HMI dikenal memiliki kader-kader yang berjiwa kritis dan militan, hal tersebut telah membuat HMI menjadi salah satu Organisasi yang sangat dikenal di masyarakat, Perjuangan HMI dimasa lalu dan sekarang tentunya memiliki alur perjuangan yang berbeda jika berdasarkan pada Nilai Dasar Perjuangan dan kondisi Indonesia saat ini.

---

<sup>4</sup>Syahrir, *Pilihan Angkatan Muda, Menunda Atau Menoleh Kekalahan*, h .3.

<sup>5</sup>PB HMI, *Hasil-Hasil Kongres XXV 2006*, Makassar: Tanpa Penerbit, 2006, h. 62.

Disamping memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan, HMI tak lupa membina persatuan umat Islam. Ajaran Islam dengan tegas mengajarkan betapa mutlaknyanya perasatuan itu.<sup>6</sup> beberapa firman Allah Swt , berikut ini menunjukkan perlunya persatuan itu harus dipelihara dan perpecahan harus dihindari.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

Artinya : Manusia itu adalah umat yang satu.(Qs.Al-Baqarah 213)<sup>7</sup>

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Artinya : Dan berpegang tegulah kamu semuanya pada Allah ( agama allah) dan janganlah kamu bercerai-berai ( Qs.Al-Imran 103).<sup>8</sup>

وَلَا تَنزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِجْمُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya : Dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabirlah.Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. ( Qs.Al Anfal 46)<sup>9</sup>.

Kutipan Firman Allah tersebut berhubungan dengan pentingnya upaya mempersatukan umat sebagai landasan keutuhan negara dan persatuan. Masalah utama Indonesia hari ini adalah semakin kompleksnya isu-isu sosial politik. Kondisi tersebut menuntut HMI untuk semakin aktif dalam menjalankan

<sup>6</sup>Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (1947-1975)* ,(Mizaka Galiza: Yogyakarta,1975),h.30.

<sup>7</sup>Alquran dan Terjemahannya , Kementrian Agama ( Bandung: Jabal,2010)h.33.

<sup>8</sup>Alquran dan Terjemahannya,h.63.

<sup>9</sup> Alquran dan Terjemahannya,h.183.

fungsinya sebagai organisasi sosial, tuntutan untuk mencapai kesejahteraan seharusnya selalu diupayakan agar Pemerintah lebih tanggap dalam menyelesaikan berbagai masalah Kebangsaan.

Manusia sebagai makhluk sosial ia membutuhkan manusia lain, membutuhkan sebuah kelompok-dlam bentuk yang minimal, yang mengakui keberadaannya dan dalam bentuk yang maksimal- kelompok di mana dia dapat bergantung kepadanya. Isu-Isu sosial politik yang mewarnai perjalanan bangsa Indonesia justru menyeret elit-elit HMI pada tataran politik praktis, padahal HMI Bukan organisasi politik, tetapi organisasi sosial kemasyarakatan yang beranggotakan mahasiswa islam yang didirikan oleh Lafran Pane pada 5 Februari 1947.<sup>10</sup>

Berbagai sektor, kita dapat menemukan kader-kader HMI terutama dalam birokrasi Pemerintahan , birokrasi Kampus, pengurus Ormas, LSM Wirausaha bahkan tidak jarang kita temukan dalam berbagai partai politik. Diaspora kader HMI merupakan output keberhasilan proses Kaderisasi yang berjalan di interal HMI.

Tantangan HMI saat ini adalah output kader HMI ( biasanya tergabung dalam KAHMI) dan kader HMI yang masih menjalin relasi Senior dan Junior bertemu dalam titik kepentingan yang sama. Hal tersebut bisa saja bermanfaat dan berdampak positif apabila tidak melanggar Aturan HMI, sebab memberikan manfaat juga diajarkan dalam Islam sebagaimana hadis berikut :

---

<sup>10</sup>Muhammad Alfian Mahyu, *Menjadi Pemimpin Politik*, ( Jakarta:Gramedia Pustaka,2009),h.81.



عَنْ جَابِرٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَرْحَمْ لَمْ يَرْحَمْهُ خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ»

*Artinya: “Diriwayatkan dari Jabir, Rasulullah bersabda: orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak bersikap ramah. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya”.*<sup>11</sup>

Cara berfikir yang dituju oleh NDP HMI adalah pola berfikir kritis dan tidak terjebak pada pola pikir hitam dan putih. Pola pikir hitam dan putih membuat orang tidak mampu melihat pemikiran alternatif lainnya.<sup>12</sup> Corak berfikir HMI yang seperti itu menjadi tantangan ketika Kader HMI telah terjun di dunia politik. Tuntutan untuk mengikuti ideologi partai baik itu partai yang berasakan nasionalis maupun agama.

Afiliasi yang melibatkan kader HMI yang telah bergabung di Partai politik dan Kader HMI yang masih berproses di HMI bisa saja menimbulkan permasalahan apabila terdapat garis kepentingan yang dapat menyebabkan program HMI dibenturkan oleh kepentingan Partai Politik tertentu. Hal ini jelas bertentangan dengan sifat dan garis independen yang menjadi watak organisasi HMI.<sup>13</sup>

Perwujudan dari pengembangan independen ini bagi anggota terutama untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan adanya pengembangan dan pertumbuhan yang maksimal dari potensi kualitas pribadi anggota-anggota HMI.

<sup>11</sup>Muhammad Nasrudin Al Albani, Sahih Al Jami’ Al-Shagir Wa Ziyadatuhu, (Al\_Maktab Al-Islami, 1988, Cet.III), h.49

<sup>12</sup>Islam Mazhab HMI Azhari Akmal Taringan, *Islam Mazhab HMI*, (Jakarta: Kultura, 2007), h.4.

<sup>13</sup>Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (1947-1975)*, h.175.

Sebaliknya menjaga dan memelihara sifat independen HMI guna menopang pengembangan sifat kepeloporan, keberanian, dan kritis yang harus diperankan oleh HMI secara organisatoris.<sup>14</sup>

Menurut penulis, Kader HMI yang telah berproses di HMI bebas untuk berkiprah di mana saja termasuk di partai politik, baik itu partai politik yang nasionalis ataupun religius, begitupun dengan kader HMI yang masih berproses dikepengurusan HMI, tidak ada batasan untuk membangun relasi dengan Senior/Alumni di HMI. namun masalahnya adalah mereka tidak dibenarkan untuk membangun komitmen-komitmen dalam bentuk apapun dengan pihak di luar HMI selain segala sesuatu telah diputuskan secara organisatoris.<sup>15</sup> Pada tataran membangun komitmen inilah yang kadang menjadi masalah, sebab interaksi tersebut cenderung menyebabkan konflik kepentingan, konflik kepentingan tersebut dapat berdampak buruk terhadap kondisi internal HMI itu sendiri, termasuk pada HMI Cabang Gowa Raya.

Problem tersebut misalnya kontestasi politik, pro kontra berbagai kebijakan pemerintah daerah, bahkan kontestasi elit di kampus-kampus adalah indikasi dari terbangunnya afiliasi antara HMI dengan partai politik atau golongan tertentu. Fenomena tersebut berbanding terbalik dengan dasar dan kriteria setiap sikap HMI semata-mata adalah untuk kepentingan nasional bukan kepentingan satu golongan partai atau penguasa sekalipun.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (1947-1975)*,h.174.

<sup>15</sup>Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (1947-1975)*,h.174.

<sup>16</sup>Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (1947-1975)*,h.174.

Indikasi terjalinya Afiliasi HMI Cab.Gowa Raya dengan partai politik tertentu merupakan ujian bagi kader-kader HMI, sebab aspek pragmatisme dan pemahaman terhadap penerapan nilai-nilai dasar pergerakan menjadi dua hal yang sukar dipisahkan oleh karna faktor *simbiosis mutualisme*.

Indikasi Afiliasi yang terbangun antara HMI Cab.Gowa Raya dengan partai politik tertentu menjadi tantangan bagi Kader HMI untuk mengembangkan nilai-nilai NDP dalam aktivitas politik mereka, sebab tidak sedikit kader HMI yang terjun dalam dunia politik justru terjatuh dalam kasus korupsi termasuk tokoh senior Anas Urbaningrum.

Afiliasi pada umumnya selalu memberikan kesan *dependen* terhadap 2 pihak yang menjalin relasi, pada ranah ini motif dari kader HMI yang masih berproses di HMI dan kader yang telah merapat ke Partai politik ataupun di pemerintahan harus diketahui untuk melihat sejauh mana nilai-nilai ajaran HMI itu diterapkan sehingga afiliasi tersebut dapat dilihat sebagai persinggungan antara kepentingan HMI Cab.Gowa Raya dengan kepentingan elit yang telah terbangun atau wujud dari proses pembelajaran di HMI Cab.Gowa raya itu sendiri.

Khawatiran penulis terhadap indikasi Afiliasi tersebut adalah ketika kader HMI yang memegang kekuasaan politik pada akhirnya lebih bersifat individual atau paling tidak lebih berpihak terhadap partainya. Tidak jarang terdapat alumni HMI yang berusaha melepaskan afiliasi ketika citra HMI tidak menguntungkan dan sebaliknya, tidak sedikit pula yang mengaku sebagai kader HMI ketika alumni HMI memegang kekuasaan.

Diaspora kader HMI yang terjun ke dunia politik menjadi tantangan bagi kader HMI untuk mempertahankan nilai-nilai independensi, idealisme serta pengaktualisasian NDP dalam praktik politik Indonesia pada umumnya dan Gowa pada khususnya.

### ***B. Rumusan Masalah***

1. Bagaimana bentuk afiliasi Kader HMI cabang Gowa Raya pada partai politik di Provinsi Sulawesi Selatan ?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi kader-kader HMI Cabang Gowa Raya untuk bergabung di Partai Politik ?

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bentuk Afiliasi Kader HMI Cab.Gowa Raya pada partai politik di Provinsi Sulawesi Selatan.
  - b. Untuk mengetahui Faktor yang melatarbelakangi kader-kader HMI untuk bergabung di Partai Politik.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Kegunaan Teoritis
    - 1) Untuk memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang studi afiliasi Kader HMI Cabang Gowa Raya pada partai politik di Kabupaten Gowa.
  - b. Kegunaan Praktis
    - 1) Sebagai informasi bagi pihak yang mempunyai ketertarikan terhadap wacana keorganisasian terutama yang terkait dengan Afiliasi HMI dan partai politik.

#### ***D. Fokus Penelitian***

Untuk memfokuskan penelitian dan membatasi ruang lingkup pembahasannya serta menghindari pemaknaan dan persepsi yang beragam terhadap judul proposal, Afiliasi Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Dalam Partai Politik (Studi Kasus HMI Cabang Gowa Raya). maka penting menjelaskan maksud beberapa istilah (variabel) yang terdapat dalam judul tersebut, di antaranya:

- 1) Afiliasi, secara bahasa adalah pertalian sebagai anggota atau cabang, perhubungan<sup>17</sup>. Afiliasi digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan hubungan antara Kader HMI dan Partai Politik. Hubungan tersebut berada pada tataran politik praktis, yaitu keterlibatan kader HMI menjadi simpatisan partai politik dan Keterlibatan kader yang telah berproses di HMI menjadi anggota partai politik tertentu.
- 2) Kader adalah sekelompok orang yang sengaja di rekrut berproses dan dibina secara khusus untuk melanjutkan misi suci organisasi.<sup>18</sup>. Dalam penelitian ini kader yang dimaksud adalah mahasiswa yang masih berproses di Kepengurusan HMI di Cabang Gowa Raya maupun kader yang telah selesai melanjutkan studi sehingga unsur kemahasiswaan tidak lagi menjadi identitas mereka, biasanya disebut Alumni dan terhimpun dalam KAHMI ( Korps Alumni HMI).
- 3) HMI adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang beranggotakan mahasiswa

---

<sup>17</sup>Tim Penyusun, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Media Centre,2012)h.18.

<sup>18</sup>Said Muniruddin, *Bintang Arasy, Tafsir Filosofis-Gnostik Tujuan HMI*, h.47.

islam yang didirikan oleh Lafran Pane pada 5 Februari 1947.<sup>19</sup> Dalam konteks penelitian ini HMI yang akan diteliti adalah pada tataran ruang lingkup HMI Cabang Gowa Raya yang telah melahirkan kader-kader yang menjadi subjek penelitian ini .

- 4) Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisasi dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaan ya untuk memilih, dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat<sup>20</sup>. Dalam konteks penelitian ini partai politik yang dijadikan sebagai subjek adalah partai politik yang telah lolos mengikuti verifikasi KPU.

#### ***E. Tinjauan Pustaka***

1. Karya ilmiah lain yang dihasilkan oleh M. Rusli Karim bertajuk “*HMI MPO Dalam Kemelut Modernisme Politik di Indonesia*” membahas konflik dalam HMI ketika mencontohi kebijaksanaan kerajaan pimpinan Soeharto dengan menggunakan pendekatan modern dan politik secara spesifik. Pada dasarnya, buku ini lebih memfokuskan kajian pemikiran dan sikap HMI dalam arus modernisasi yang berlangsung di Indonesia dan kemudiannya menjadi faktor penyebab perpecahan dalaman HMI sehingga terbentuknya dua kelompok, iaitu HMI Majlis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) yang menentang kebijaksanaan kerajaan mengenai pancasila sebagai satu-satunya

---

<sup>19</sup>Muhammad Alfian Mahyu, *Menjadi Pemimpin Politik*, ( Jakarta:Gramedia Pustaka,2009),h.81.

<sup>20</sup>Muliansyah, *Political, ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik dan Walfare State*, (Jakarta : Litera, 2014),h.132.

asas organisasi dan HMI yang menerima asas pancasila.<sup>21</sup>Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terkait Afiliasi yang dijalin oleh HMI Cabang Gowa Raya dengan partai Politik.

2. Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya yang bertajuk “*Islam Universal: Kontekstualisasi NDP HMI Dalam Kehidupan Beragama Di Indonesia*”.<sup>22</sup>

Buku ini membahas Nilai-Nilai Dasar Perjuangan yang sekaligus menjadi ideologi pergerakan. Faham keagamaan yang dirumuskan oleh Nurcholish Madjid dan kawan-kawannya merupakan hasil kajian mereka terhadap al-Quran dan Hadis yang kemudian dijadikan sebagai materi kajian wajib dalam latihan Perkaderan di HMI.

Buku ini secara umum merupakan penjabaran daripada NDP dalam perpektif keislaman dan keindonesiaan. Penyelidik berpendapat bahwa buku ini sangat berguna untuk memahami pemikiran-pemikiran keagamaan HMI yang dipindahalihkan kepada seluruh ahli HMI dari masa ke masa. Meskipun penelitian ini sama-sama mencoba mengskplor NDP HMI namun pada tataran praktik, Penelitian yang akan dilakukan penulis lebih condong pada tataran relasi HMI dan Partai politik.

3. Dandung Arifridho karyanya Pengaruh Organisasi Kepemudaan HMI Terhadap Partisipasi Politik Anggota HMI Di Bandar Lampung<sup>23</sup>, Dari hasil penelitian ini terdapat pengaruh antara organisasi kepemudaan Himpunan

---

<sup>21</sup>M.Rusli Karim. *HMI MPO Dalam Kemelut Modernisasi Politik Di Indonesia*, Bandung: Mizan).

<sup>22</sup>Azhari Akmal Tarigan, *Islam Universal: Kontekstualisasi NDP HMI Dalam Kehidupan Beragama Di Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media,2003).

<sup>23</sup>Dandung Arifridho, *Pengaruh Organisasi Kepemudaan HMI Terhadap Partisipasi Politik Anggota HMI Di Bandar Lampung*,2017)

Mahasiswa Islam (HMI) terhadap partisipasi politik. Dari hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara organisasi kepemudaan terhadap partisipasi politik sebesar 0,457 atau dapat dikategorikan sedang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa organisasi kepemudaan HMI yang sudah memproklamasikan fungsinya sebagai organisasi kader, menjadikan pengkaderan sebagai jantung kehidupan organisasinya. Meskipun sama-sama melibatkan HMI pada perspektif politik, namun pada penelitian yang akan dilakukan penulis ini lebih condong pada efektivitas aktualisasi Nilai Dasar Perjuangan HMI meskipun terdapat Afiliasi dengan Partai Politik.

4. Agussalim Sitompul dalam bukunya *“Pemikiran Keislaman dan Keindonesiaan HMI: Menyatu Dengan Umat Menyatu Dengan Bangsa”*.<sup>24</sup> Buku yang diangkat dari tesisnya tersebut telah mengungkapkan tentang penyatuan pemikiran keislaman dan keindonesiaan di atas titik pertemuan dasar negara Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, tidak ada lagi kesenjangan antara Islam dan Pancasila, akan tetapi keduanya selaras dengan realiti sosial budaya bangsa Indonesia dengan ciri utama pertumbuhan, perkembangan dan kemajemukan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah tidak hanya pada tataran Keislaman dan Kebangsaan, namun juga pada tataran politik praktis yang melibatkan kader HMI dan Partai Politik.

---

<sup>24</sup>Agussalim Sitompul, *Pemikiran Keislaman Dan Keindonesiaan HMI: Menyatu Dengan Umat Menyatu Dengan Bangsa*, Misaka Galiza.2008).



5. Solichin dalam karyanya "*HMI Candradimuka Mahasiswa*"<sup>25</sup> Buku ini hanya menyampaikan fakta yang dirasakan oleh penulisnya. Penulis menginterpretasi terhadap fakta yang ada, sehingga memberikan gambaran lengkap tentang HMI. Mengapa HMI dapat eksis ditengah pergolakan politik menjelang pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI)? masa penempahan diri atau juga masa penggemblengan diri sebagai kader umat dan bangsa. Hal tersebut menjadi prasyarat yang dimiliki oleh HMI, kerana HMI adalah organisasi mahasiswa yang mewadahi calon-calon intelektual dan insan akademik yang merupakan kelompok elit pemikir bagi bangsa. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah lebih fokus pada motif Kader HMI Cabang Gowa Raya untuk terjun di Partai politik baik Partai Politik yang berasaskan Islam mapun Nasionalis.



---

<sup>25</sup> Solichin , *HMI Candradimuka Mahasiswa*,( Jakarta:Sinergi Persadatama Foundation, 2010).

## BAB II

### TINJUAN TEORITIK

#### A. Teori

##### 1. Teori Patronase

Istilah patron berasal dari Bahasa Latin “*patrōnus*” atau “*pater*”, yang berarti ayah (*father*). Karenanya, ia adalah seorang yang memberikan perlindungan dan manfaat serta mendanai dan mendukung terhadap kegiatan beberapa orang. Sedangkan klien juga berasal dari istilah Latin “*cliēns*” yang berarti pengikut. Dalam literatur ilmu sosial patron merupakan konsep hubungan stata sosial dan penguasaan sumber ekonomi. Konsep patron selalu diikuti oleh konsep klien, tanpa konsep klien konsep patron tentu saja tidak ada. Karenanya, keduanya istilah tersebut membentuk suatu hubungan khusus<sup>4</sup> yang disebut dengan istilah *clientelism*.<sup>26</sup>

Selain itu, terdapat pula pergeseran dan perubahan pola patronase yang dulunya *patron* adalah kalangan bangsawan atau *karaeng* yang memiliki pengaruh dan akumulasi modal sosial dan politik di wilayah tersebut, namun kini patronase bersumber dari akumulasi modal sosial, ekonomi, dan sebagainya yang dimiliki oleh berbagai kalangan. Pergeseran yang terjadi disebabkan oleh ritus dan kepercayaan tradisional yang mulai ditinggalkan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Moh. Hefni, *Patron-Client Relationship* Pada Masyarakat Madura, *Jurnal* (Karsa, Vol. XV No. 1 April 2009)

<sup>27</sup>Aryundha Istiqlal G, 2015, “Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa”, *Skripsi*, Ilmu Politik Dan Pemerintahan, Universitas Hasanuddin Makassar, h.92.

Suatu interaksi sosial masing-masing aktor melakukan hubungan timbal-balik. Diungkapkan oleh Scott bahwa *patron-client* merupakan suatu kasus khusus hubungan antara dua orang, yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental, yaitu seseorang dengan status ekonomi lebih tinggi (*patron*) menggunakan pengaruh dan sumber daya untuk memberikan perlindungan dan/atau keuntungan kepada seseorang dengan status lebih rendah (*client*) yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan dukungan dan bantuan, termasuk jasa pribadi kepada *patron*.<sup>28</sup>

*Patron* dan *client* berasal dari suatu model hubungan sosial yang berlangsung pada zaman Romawi kuno. Seorang *patronus* adalah bangsawan yang memiliki sejumlah warga dari tingkat lebih rendah, yang disebut *clients*, yang berada di bawah perlindungannya. Meski para *client* secara hukum adalah orang bebas, mereka tidak sepenuhnya merdeka. Mereka memiliki hubungan dekat dengan keluarga pelindung mereka. Ikatan antara *patron* dan *client* mereka bangun berdasarkan hak dan kewajiban timbal balik yang biasanya bersifat turun temurun.<sup>29</sup>

Hubungan *patron-client* adalah pertukaran hubungan antara kedua peran yang dapat dinyatakan sebagai kasus khusus dari sebuah ikatan yang melibatkan persahabatan instrumental dimana seorang individu dengan status sosio-ekonominya yang lebih tinggi (*patron*) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan, serta keuntungan-keuntungan bagi

---

<sup>28</sup>James C. Scott, 1972, "Patron Client, Politics And Political Change In South East Asia" Dalam *The American Political Science Review*. Vol. 66, No. 1 (Mar., 1972), h.91

<sup>29</sup>Christian Pelras, 2009, 'Hubungan Patron Klien Pada Masyarakat Bugis Dan Makassar Di Sulawesi Selatan' Dalam *Kuasa Dan Usaha Di Masyarakat Sulawesi Selatan*, Roger Tol Dkk (Ed.). Makassar-Jakarta: Innawa-KITLV Jakarta, h.21.

seseorang dengan status yang dianggapnya lebih rendah (*client*). *Client* kemudian membalasnya dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan termasuk jasa pribadi kepada patronnya. Sebagai pola pertukaran yang tersebar, jasa dan barang yang dipertukarkan oleh *patron* dan *client* mencerminkan kebutuhan yang timbul dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Menurut Scott, karakteristik hubungan *patron-client* yang membedakan dengan hubungan sosial lain, antara lain:<sup>30</sup>

1) Adanya Ketidakseimbangan (*Inequality*) dalam pertukaran.

Ketidakseimbangan terjadi karena *patron* berada dalam posisi pemberi barang atau jasa yang sangat diperlukan *client* dalam mencapai tujuan pribadinya. Muncul rasa wajib membalas pada diri *client* akibat pemberian tersebut, selama pemberian itu masih mampu memenuhi kebutuhan *client* yang paling pokok. *Client* adalah aktor yang masuk dalam hubungan pertukaran yang tidak seimbang ini, ia tidak mampu membalas sepenuhnya pemberian *patron*, sehingga membuat *client* terikat dengan kewajiban hutang dan bergantung pada *patron*.

Ketidakseimbangan ini lebih tepat jikadipandang dari sisi kelebihan *patron* dalam hal status, posisi, dan kekayaan. Sedangkan nilaibarang atau jasa itu sendiri sangat ditentukan oleh para pelaku pertukaran. Makin dibutuhkan barang atau jasa tersebut, makin tinggi pula nilaibarang itu baginya.

2) Sifat Tatap Muka (*Face of Face Character*)

Memberikan makna bahwa hubungan *patron-client* yang terjadi adalah hubungan yang bersifat instrumental, yaitu hubungan yang dilandasi atas dasar

---

<sup>30</sup>James C. Scott, 1972, "Patron Client, Politics And Political Change In South East Asia" Dalam *The American Political Science Review*. Vol. 66, No. 1 (Mar., 1972), h.93.

rasa saling percaya. Masing-masing pihak mengandalkan penuh pada kepercayaan karena hubungan ini tidak disertai dengan perjanjian tertulis. Oleh karena itu, meskipun hubungan *patron-client* bersifat instrumental, yaitu kedua belah pihak memperhitungkan untung rugi, namun unsur saling percaya turut menyertai.

### 3) Sifat Luwes dan Meluas

Sifat meluas terlihat tidak hanya pada hubungan kerja saja, namun juga dalam hubungan pertetangaan, kedekatan secara turun-temurun, atau persahabatan di masa lalu. Selain itu, dalam pola relasi ini, bentuk pertukaran yang disepakati bermacam-macam; tidak selalu uang atau barang, namun juga bantuan tenaga dan dukungan kekuatan.

Meskipun hubungan *patron-client* adalah bentuk hubungan timbal balik, namun hubungan *patron-client* berbeda dengan kekerabatan, karena kekerabatan merupakan hasil sosialisasi yang di dalamnya terkandung rasa saling percaya untuk mencapai tujuan, sedangkan hubungan *patron-client* bersifat persahabatan instrumental dan relasi terjadi karena tiap pihak memiliki kepentingan.

Teori Patronase ini digunakan untuk melihat bentuk afiliasi yang melibatkan kader HMI dan alumni HMI yang telah berkiprah di partai politik.

## 2. Teori Organisasi

Sejak dahulu manusia sudah diberi julukan "*Zoon Politicon*" (makhluk yang hidup berkelompok). Hal tersebut mengandung makna bahwa manusia senantiasa menginginkan hubungan-hubungan dengan orang lain.<sup>31</sup> Organisasi membantu manusia melaksanakan hal-hal dan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat

---

<sup>31</sup>J.Winardi, *Teori Organisasi Dan Pengorganisasian*, (Rajawali Press, Jakarta,2014),h.7.

dilaksanakan sendiri sebagai individu. Selain itu organisasi-organisasi dapat membentuk masyarakat melangsungkan ilmu pengetahuan. Organisasi juga merupakan sumber penting aneka macam karir di dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Terdapat beberapa alasan mengapa manusia harus mendirikan organisasi: Pertama, alasan sosial (*social reasons*) alasan mendirikan organisasi didasarkan pada kebutuhan manusia untuk bergaul dan berkomunikasi dengan manusia lainnya. Organisasi menjadi sarana bersosialisasi dan bekerja dengan hubungan yang baik dengan sesama manusia.

Kedua, alasan material (*material reasons*) manusia mendirikan organisasi berdasarkan alasan-alasan yang sifatnya material. Misalnya, memperbesar kemampuannya dengan berproses dalam organisasi, meminimalisir waktu untuk mencapai sesuatu sasaran melalui bantuan organisasi dan keuntungan finansial pribadi maupun kelompok<sup>33</sup>.

Organisasi merupakan tempat bagi administrasi publik menjalankan fungsinya, baik organisasi yang kecil maupun besar. Salah satu pengertian administrasi adalah "*the art of getting things done*"<sup>34</sup>. Seperti sebuah organisme, organisasi juga berubah dan berkembang. Perubahan, merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi. Perubahan menuntut kita untuk lebih peka terhadap apa yang terjadi di dalam dan di luar organisasi kita. Sebuah perubahan harus membawa sebuah organisasi untuk menghasilkan sesuatu yang menjadi tujuan utama organisasi tersebut.

---

<sup>32</sup>J. Winardi, *Teori Organisasi Dan Pengorganisasian*, h.1.

<sup>33</sup>J. Winardi, *Teori Organisasi Dan Pengorganisasian*, h.2.

<sup>34</sup>Anggraini Alamsyah, *Analisa Penyebab Perubahan Organisasi Di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Laporan Penelitian (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014), h.2.

Perubahan organisasi dapat dipandang dari beragam sudut, Van de Ven & Poole mengajukan bahwa penyebab perubahan organisasi dapat dijelaskan oleh salah satu teori berikut: *teleological theory*, *life-cycle theory*, *dialectical theory*, *evolutionary theory*.

- a) **Perspektif Teleologis**, percaya bahwa perubahan organisasi adalah sebuah usaha untuk mencapai keadaan ideal melalui proses yang terus menerus dari proses penentuan sasaran, eksekusi, evaluasi, dan restrukturisasi.
- b) **Teori Siklus Hidup** mengklaim bahwa organisasi adalah sebuah entitas yang bergantung pada lingkungan eksternal, siklus melalui tahap kelahiran, pertumbuhan, pendewasaan, dan kemunduran.
- c) **Teori Dialektis**, berhipotesa bahwa organisasi seperti masyarakat multikultural dengan nilai-nilai yang bertentangan. Ketika kekuatan khusus mendominasi yang lainnya, sebuah nilai dan tujuan organisasi baru dibangun, yang menghasilkan perubahan organisasi.
- d) **Teori Evolusioner**, mempunyai beragam kejadian yang terus-menerus atas seleksi, pengulangan, dan variasi.<sup>35</sup>

Teori ini digunakan untuk menganalisa masalah yang ada dari sudut pandang organisasi, peneliti ingin melihat keterlibatan kader HMI dalam membangun afiliasi dari sudut pandang organisasi.

---

<sup>35</sup>Anggraini Alamsyah, *Analisa Penyebab Perubahan Organisasi Di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*,h.4.

### 3. Konsep Tentang Motivasi

Sebelum memahami motif sosial dari para pemuda untuk ikut berpolitik, berikut pendapat para pakar psikologi sosial dalam menjelaskan arti motif. Menurut Akinson Motif sebagai sesuatu disposisi laten yang berusaha dengan kuat untuk menjaga tujuan tertentu, tujuan ini dapat berupa prestasi, afiliasi ataupun kekuasaan. Sedangkan Sri Maratniah mengatakan motif adalah suatu konstruksi yang potensial dan laten, yang dibentuk oleh pengalaman-pengalaman yang secara relatif dapat bertahan meskipun kemungkinan berubah masih ada, dan berfungsi menggerakkan serta mengarahkan perilaku ke tujuan tertentu.<sup>36</sup>

Dari pengertian tersebut arti penting dari motif adalah alasan atau dasar yang menjadi dorongan manusia dalam tingkah lakunya baik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Dengan adanya motif tingkah laku manusia akan berjalan sistematis sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Karena dapat menggerakkan manusia untuk menampilkan sesuatu tingkah laku kerah pencapaian suatu tujuan.

Sedangkan motif individu untuk ikut berpolitik menurut Clark dan Wilson, mengatakan bahwa motif seseorang untuk beraktifitas politik, yaitu :

#### 1. Insentif Material (*Material Incentives*)

Insentif Material yaitu aktivitas partai yang berdekatan dengan penguasa mereka akan mengambil keuntungan dalam 3 hal, meliputi :

Pertama, Mencari perlindungan (*patronage*) sejak era presiden Amerika Serikat yang ke 7 Andrew Jackson sudah berpandangan bahwa bekerja dalam

---

<sup>36</sup>Reski Yanti Nurdin, Pemuda dan Politik ( Studi tentang Partisipasi Politik Pemuda menjadi Anggota Legislatif di DPRD kota Makassar Periode 2009-2014), Tesis ( Yogyakarta:Universitas Gadjadara,2012),h.14



partai politik selalu dapat diharapkan untuk mendapatkan keuntungan dari Pemerintah Keuntungan disini diartikan untuk mendapatkan uang atau berlindung dibawah pemeritahan.<sup>37</sup>

Kedua menjadi pejabat yang dipilih, sebagai pengisi jabatan pemerintahan dan ada juga tawaran untuk pekerja secara profesional untuk kampanye serta menjadi pejabat publik. Kekuasaan dan jabatan adalah hal-hak yaag selalu didambakan setiap orang akan mendapatkan suatu kebanggan dan keuntungan<sup>38</sup>

Ketiga,naik peringkat atau memperoleh kedudukan yang lebih tinggi, ketika pejabat dapat melakukan kebebasan bertindak dalam alokasi layanan pemerintah dan kontrak kerja pemerintah, muncullah potensi untuk naik [angkat atau memperoleh kedudukan yang lebih tinggi.Dengan adanya kedudukan yang tinggi secara langsung menaikkan derajat atau status sosial individu dan masyarakat.<sup>39</sup>

Pemahaman tentang motif material adalah kewajaran yang normatif dalam tradisi ilm politik sendiri dengan istilah pilihan rasional atau *rational choice*, adalah ketika menghadapi beberapa piihan dalam tindakan , orang-orang biasanya melakukan apa yang ia percaya seperti memberi hasil yang terbaik.<sup>40</sup>

Rasional politis dalam menjelaskan prilaku seseorang terhadap organisasi sosial politik, oleh pakar ilmu politik pada prinsipnya diadaptasi daripada ilmu

---

<sup>37</sup> Reski Yanti Nurdin, Pemuda dan Politik ( studi tentang Partisipasi Politik Pemuda menjadi Anggota Legislatif di DPRD kota Makassar Periode 2009-2014),h,14

<sup>38</sup> Reski Yanti Nurdin, Pemuda dan Politik ( studi tentang Partisipasi Politik Pemuda menjadi Anggota Legislatif di DPRD kota Makassar Periode 2009-2014),h.16

<sup>39</sup> Reski Yanti Nurdin, Pemuda dan Politik ( studi tentang Partisipasi Politik Pemuda menjadi Anggota Legislatif di DPRD kota Makassar Periode 2009-2014),h.16

<sup>40</sup>Reski Yanti Nurdin, Pemuda dan Politik ( studi tentang Partisipasi Politik Pemuda menjadi Anggota Legislatif di DPRD kota Makassar Periode 2009-2014),h.16

ekonomi. Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dengan perilaku individu (politik). Apabila secara ekonomi anggota masyarakat dapat bertindak secara rasional yaitu menekan biaya sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dalam perilaku politik, masyarakat akan dapat bertindak secara rasional pula yaitu memberikan suara atau memilih organisasi sosial politik tertentu karena dianggap mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan meminimalisir kerugian sekecil-kecilnya.<sup>41</sup>

Dari Asumsi ini maka motif material (ekonomi) dipandang sebagai sesuatu yang memberi keuntungan yang diperoleh ketika seseorang ikut berpartisipasi politik. Jadi motif material adalah motif rasional seseorang dalam beraktivitas politik yang memberikan keuntungan besar demi kepentingan pribadi.

Pertimbangan rasional tidak hanya berupa memilih alternatif yang paling menguntungkan atau yang mendatangkan kerugian yang sedikit tetapi juga dalam arti memilih alternatif yang menimbulkan resiko yang paling kecil. Dengan begitu diasumsikan bahwa orang-orang dalam memilih keterlibatan politik tersebut mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu sosial politik dan perubahan politik yang terjadi pada masanya.<sup>42</sup>

## 2. Insentif Solidaritas.

Insentif Solidaritas, yaitu mencari kehidupan sosial baru dari yang mereka miliki untuk kepentingan solidaritas sosial. Alasannya keuntungan personal tidak mudah untuk diidentifikasi dan tentu tidak mudah untuk dibandingkan dengan

---

<sup>41</sup> Reski Yanti Nurdin, Pemuda dan Politik ( Studi tentang Partisipasi Politik Pemuda menjadi Anggota Legislatif di DPRD kota Makassar Periode 2009-2014), h. 17

<sup>42</sup> Reski Yanti Nurdin, Pemuda dan Politik ( studi tentang Partisipasi Politik Pemuda menjadi Anggota Legislatif di DPRD kota Makassar Periode 2009-2014), h. 18

keuntungan material. Seseorang bisa merasakan bagaimanapun penghargaan sosial politik dalam persahabatan organisasi politik. Motif sosial adalah motif yang timbul untuk memenuhi kebutuhan individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya.

Dalam penelitian ini, arti dari motif sosial individu adalah motif seseorang memiliki kebutuhan (keinginan) akan kekuasaan untuk memberikan pengaruh kepada orang lain untuk menunjukkan eksistensi dan aktualisasi dirinya. Motif-motif merupakan alasan dari perilaku mereka muncul, mempertahankan aktifitas dan mendeterminasi arah umum perilaku seorang individu.

### 3. Insentif Idealisme (*Purposive/Issue-Based Incentives*)

Motif ini adalah keinginan individu untuk memperjuangkan sesuatu yang bersifat ideal atau yang ideologi. Adanya perbedaan dari perjuangan partai yang berlabel liberal atau konservatif terdapat motivasi yang lebih dalam dari para aktivis politik, yakni komitmen terhadap sikap/tingkah laku dalam kebijakan pemerintah dan politik, khususnya kesesuaian pemerintah dengan kondisi sosial yang terjadi pada saat itu.<sup>43</sup>

Model idealisme individu dalam keterlibatan politik diartikan sebagai dorongan pribadi individu secara sadar untuk berpolitik untuk memperjuangkan ideologi partai yang sesuai dengan idealismenya sebagai kewajiban dan tanggung jawabnya. Para aktivis politik mungkin ditempatkan oleh partainya ditempatkan oleh partainya ditempatnya masing-masing sebagai komitmen umum dari mereka

---

<sup>43</sup>Reski Yanti Nurdin, Pemuda dan Politik (studi tentang Partisipasi Politik Pemuda menjadi Anggota Legislatif di DPRD kota Makassar Periode 2009-2014), h. 18.

karena suatu kewajiban dan tugas sebagai rakyat, kepercayaan nilai-nilai demokrasi sebagai partisipasi penduduk yang melibatkan mereka.<sup>44</sup>

#### 4. Insentif Campuran

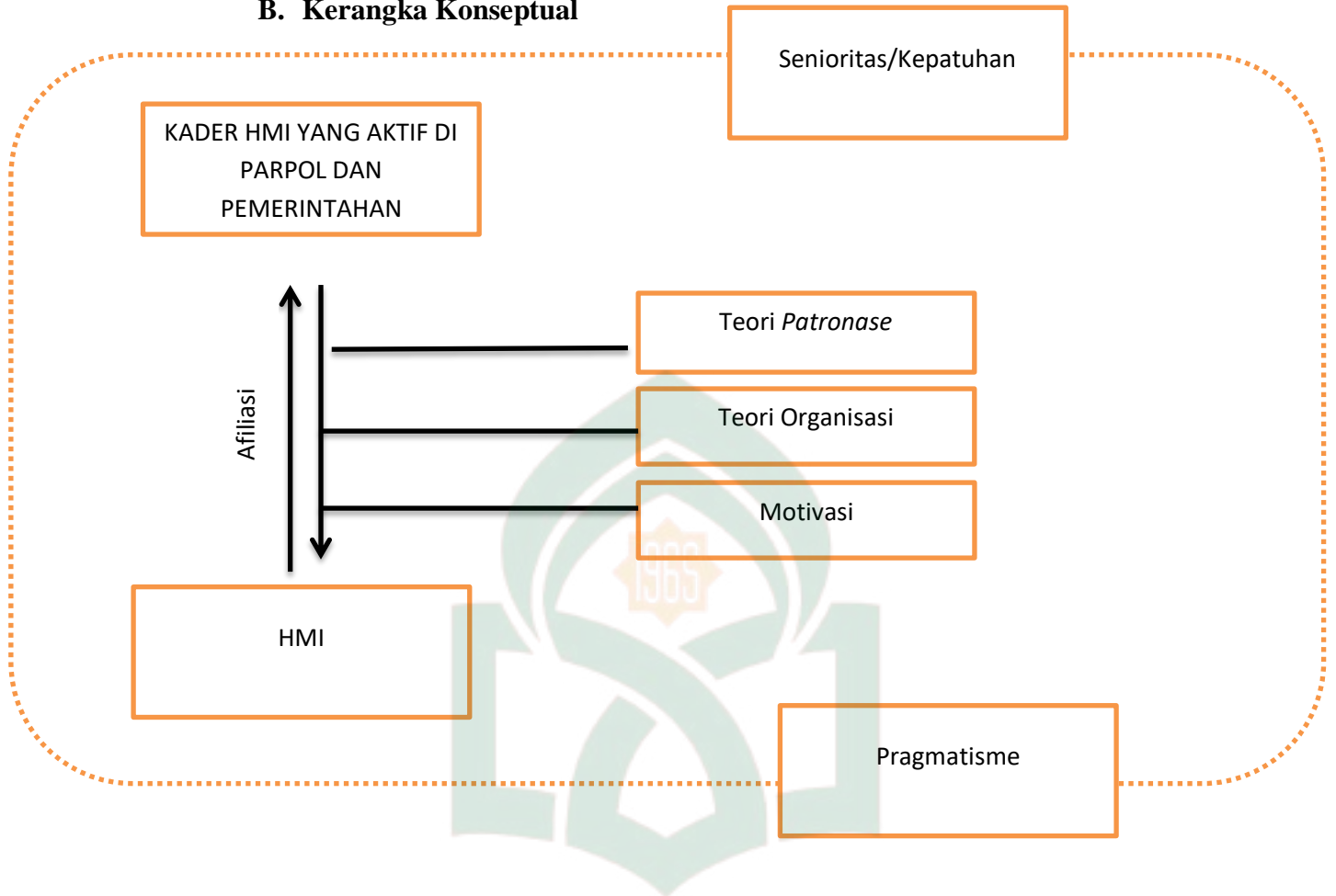
Insentif Campuran Yaitu pembaruan beberapa insentif yang telah disebutkan sebelumnya menjadi saling bertutan. Asumsinya tidak ada partai yang bersandar pada satu kepentingan saja dan sedikit orang-orang yang memasuki partai hanya karena satu motif saja. Motif bisa saja berubah begitupun bagi setiap individu. Usaha mengajak orang-orang terjun ke dunia politik mungkin saja tidak akan berlanjut kepada aktifitasnya saja.<sup>45</sup>

Konsep Motivasi ini digunakan untuk melihat motif kader HMI cabang Gowa Raya dalam membangun afiliasi dengan partai politik, dengan menggunakan konsep ini maka akan membantu peneliti untuk melihat sebab akibat dari afiliasi kader HMI Cabang Gowa Raya dalam melakukan manuver politiknya.

---

<sup>44</sup>Reski Yanti Nurdin, Pemuda dan Politik ( studi tentang Partisipasi Politik Pemuda menjadi Anggota Legislatif di DPRD kota Makassar Periode 2009-2014),h.18.

<sup>45</sup> Reski Yanti Nurdin, Pemuda dan Politik ( studi tentang Partisipasi Politik Pemuda menjadi Anggota Legislatif di DPRD kota Makassar Periode 2009-2014),h.19.

**B. Kerangka Konseptual**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Lokasi penelitian***

Peneliti dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan fokus pada kader HMI cabang Gowa Raya yang saat ini berkecimpung pada beberapa partai politik di Sulawesi Selatan.

#### ***B. Jenis Penelitian***

Metode penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan teknologi baru, membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis sehingga dapat dirumuskan teori, proses gejala alam dan sosial<sup>46</sup>.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis karena penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argument yang tepat. Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>47</sup>

#### ***C. Sumber Data Penelitian***

Pada penelitian kualitatif biasa mengumpulkan data dari beragam sumber seperti, wawancara, observasi, dan dokumentasi, ketimbang hanya mampu

---

<sup>46</sup>Al-Widyatama Dan Veronika Sudiati, *Dasar-Dasar Menulis Karya Ilmiah* (Jakarta: Gramedia Widiasarma Indonesia, 1997), h.73.

<sup>47</sup>John W Creswell, *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*(Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2012),h.4.

pada satu sumber data saja. Kemudian<sup>48</sup>, adapun sumber data yang digunakan yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data ini diperoleh langsung dari Subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer ini dapat berupa catatan proses atau catatan lapangan langsung atau disebut *field note*, lapangan kegiatan harian juga dokumentasi kegiatan yang ada dilokasi penelitian.

### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan bacaan atau referensi yang menunjang dalam penelitian ini. Data sekunder ini berupa buku-buku, jurnal, ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

### **D. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini instrument penelitian adalah peneliti sendiri, manusia sebagai *human instrument*, berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.<sup>49</sup>

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Salah satu tahap yang penting dalam sebuah penelitian adalah kegiatan

---

<sup>48</sup>John W Creswell, *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*,h..261

<sup>49</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D* ( Bandung:CV.Alfabeta,2008 ) h.222.

pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti harus benar-benar memahami berbagai hal yang berkaitan dengan pengumpulan data, yang dalam penelitian kualitatif ini dilandasi strategi berfikir fenomenologis, yang selalu bersifat lentur dan terbuka dengan menekankan analisis induktif.

Penelitian kualitatif meletakkan data penelitian sebagai alat dasar pembuktian. Tetapi sebagai model dasar bagi pemahaman. Karena pengumpulan data dalam penelitian kualitatif merupakan kegiatan yang lebih dinamis. Adapun teknik pengumpulan data yang erat kaitannya dengan metode penelitian yang digunakan peneliti disini ada tiga teknik yaitu<sup>50</sup> :

### 1. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban informan dicatat atau direkam. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan oleh penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.<sup>51</sup>

Dalam konteks penelitian ini, Peneliti melakukan interview secara langsung kepada informan agar mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, proses wawancara tersebut dilakukan secara mendalam dengan membahas 2 variabel utama yaitu bentuk afiliasi kader HMI cabang Gowa Raya dan Faktor-faktor yang mempengaruhi kader berafiliasi dengan partai politik yang ada di Sulawesi Selatan.

---

<sup>50</sup>Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), h.101.

<sup>51</sup>Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1990, h.173.



## 2. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (observasi) merupakan kegiatan yang digunakan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument.

Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan terjadi di lapangan. Peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian guna mengumpulkan data secara langsung sebab dengan cara demikian, peneliti dapat memperoleh data dengan baik, utuh dan akurat.

Pengamatan (observasi) dalam arti luas berarti bahwa peneliti secara terus menerus melakukan pengamatan atas perilaku seseorang. Sedangkan pengertian observasi secara lebih sempit adalah mengamati dan mendengar perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi, serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tingkat penafsiran analisis.<sup>52</sup>

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan terlibat dan berinteraksi dengan subjek penelitian ini, melakukan interaksi dengan kader HMI Cabang Gowa Raya sehingga dengan cara tersebut peneliti mengumpulkan informasi baik berupa pola kader dalam mengkodasi kepentingan mereka, pola interaksi kader HMI dengan alumni serta mengetahui dinamika kader HMI dalam partai politik yang mereka tempati bernaung.

---

<sup>52</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Remaja Rosdakarya, 1996),h.100.

### 3. Dokumentasi

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang telah ada.<sup>53</sup>

Pada penelitian ini penulis melakukan dokumentasi wawancara dengan informan, mengumpulkan profil HMI dari situs resmi atau buku-buku yang telah diterbitkan, berbagai surat izin penelitian, sehingga proses tersebut dapat menunjang keberlangsungan penelitian ini.

#### *F. Teknik Analisis Data*

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menganalisis data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>54</sup>

Untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian non-hipotesis. Dengan hanya mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan suatu obyek penelitian berdasarkan faktor-faktor apa adanya. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya, metode untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan

---

<sup>53</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h.240.

<sup>54</sup>Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), h..104.

bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan berupaya mencari makna.<sup>55</sup>

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif induktif yaitu dengan data dan informasi yang telah dikumpulkan di pisah-pisah dan kemudian dikelompokkan sesuai dengan rincian masalah masing-masing. Kemudian data dan informasi tersebut dibandingkan-bandingkan antara yang satu dengan yang lain, akan tetapi tetap menggunakan proses perfikir.

Sedangkan secara garis besar, teknik analisis data meliputi 3 langkah yaitu :

1. Persiapan Mengecek nama dan mengecek kelengkapan data, mengecek isian data.
2. Tabulasi Penyimpanan data, analisa data untuk tujuan penarikan kesimpulan
3. Penerapan data yang sesuai dengan pendekatan penelitian.



---

<sup>55</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Remaja Rosdakarya, 1996), h.103.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.***

Gambaran umum pada bab ini memuat tentang organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Gambaran tersebut meliputi sejarah singkat organisasi, visi misi, tujuan, struktur, serta independensi HMI. Uraian tersebut menurut peneliti memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

##### **1. Sejarah HMI**

HMI didirikan di Yogyakarta pada 5 Februari 1947 yang diprakarsai oleh Lafran Pane, merupakan organisasi mahasiswa Islam yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Sejarah HMI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Indonesia dan umat Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan karena sikap HMI yang memandang Indonesia dan Islam sebagai satu kesatuan integratif yang tidak perlu dipertentangkan.

Bila membicarakan sejarah HMI maka tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Sejarah HMI merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia, dimulai dari mempertahankan kemerdekaan, penumpasan PKI pada masa orde lama dan dilanjutkan sejarah Indonesia pada masa orde baru. Menurut Agus Salim Sitompul dalam buku *sejarah dan perjuangan HMI (1947-1975)* menjelaskan bahwa latar belakang berdirinya HMI ada tiga faktor, yaitu :

- a) Situasi Negara kesatuan republik Indonesia.
- b) Kondisi umat Islam Indonesia.

c) Situasi dunia perguruan tinggi dan kemahasiswaan.<sup>56</sup>

Sedangkan menurut Budi Riyoko, disamping tiga faktor tersebut, terdapat faktor lain yang melatarbelakangi berdirinya, HMI yaitu situasi dunia internasional. Sampai saat ini HMI masih tetap hadir dan memberikan peranannya pada bangsa Indonesia. Berdasarkan data yang tercatat dalam kongres HMI XXIX pada tahun 2005 di Pekanbaru menyatakan bahwa jumlah cabang HMI setingkat kabupaten di Indonesia mencapai lebih dari 200 cabang dari Sabang sampai Merauke, dengan jumlah anggota aktif sebanyak lebih dari 500.000 mahasiswa se-Indonesia.

Berawal dari beberapa latar belakang di atas muncul sebuah keinginan untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang mampu mengkoordinir dan memperhatikan kepentingan mahasiswa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Akhirnya pada tahun 1947 berdirilah HMI sebagai sebuah organisasi mahasiswa Islam pertama yang ada di Indonesia. Ide atau gagasan pembentukan organisasi mahasiswa Islam HMI sudah ada sejak bulan November 1946 yang diprakasai oleh Lafran Pane, mahasiswa tingkat satu Sekolah Tinggi Islam (STI), sekarang Universitas Islam Indonesia (UII). Namun baru pada tahun berikutnya gagasan tersebut dapat teralisasi.

Dikala gagasan tersebut muncul Lafran Pane mengundang para mahasiswa Islam yang berada di Yogyakarta baik di Sekolah Tinggi Islam (STI), Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada (sekarang UGM) dan Sekolah Tinggi Teknik (STT), untuk menghadiri rapat, guna membicarakan maksud gagasan tersebut.

---

<sup>56</sup>Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (1947-1975)*, h.5.

Rapat ini dihadiri kurang lebih 30 orang mahasiswa yang diantaranya adalah anggota .

Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY) dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Namun rapat tersebut tidak menemukan kesepakatan, karena adanya penolakan dari anggota PMY dan GPII yang takut tersaingi dan akan kehilangan pengaruhnya terhadap mahasiswa. Walaupun beberapa kali mengalami kegagalan, namun hal ini tidak menyurutkan semangat Lafran Pane muda. Ia justru semakin semangat dan ingin segera mendirikan HMI. Berbagai cara dilakukan, mulai dari berdiskusi dengan Prof. Abdul Kahar Muzakar selaku rektor STI, menyiapkan anggaran dasar dan visi misi organisasi sampai mencari mahasiswa di luar STI untuk menyamakan visi.

Seiring semakin matangnya situasi dan persiapan pembentukan HMI dan dukungan terhadap cita-cita Lafran Pane semakin bertambah, sehingga pada tanggal 5 Februari 1947 (bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1366 H), di salah satu ruangan kuliah Sekolah Tinggi Islam di jalan Setyodiningrat (sekarang jalan Senopati) Yogyakarta, Lafran Pane dan kawan-kawan meminta izin kepada Yahya Husein selaku dosen mata kuliah Tafsir untuk menggunakan jam kuliah tersebut agar dapat mengadakan rapat pembentukan HMI. Setelah mendapatkan izin dari Yahya Husein, masuklah Lafran Pane yang langsung berdiri di depan kelas dan memimpin rapat yang dalam pemaparannya mengatakan, bahwa hari ini adalah rapat pembentukan organisasi Mahasiswa Islam, karena semua persiapan yang diperlukan sudah beres. Siapa yang mau menerima berdirinya organisasi

mahasiswa Islam ini, itu sajalah yang diajak, dan yang tidak setuju biarkanlah mereka terus menentang.

HMI adalah sebuah organisasi mahasiswa Islam yang didirikan pada 14 Rabiul Awal 1366 H atau tanggal 5 Februari 1974 atas prakarsa Lafran Pane beserta 14 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam Yogyakarta di Yogyakarta. Organisasi mahasiswa yang terbesar dan tertua di Indonesia yang lahir hampir bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I. Dalam suasana revolusi fisik yang menggelora HMI berdiri dan menetapkan Tujuannya, yaitu “Mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan meningkatkan Syi’ar Islam di tanah air”.

Kelahiran HMI merupakan keharusan dari realitas sejarah umat Islam yang masih skeptis atas aktivitas mahasiswa yang penuh dengan hura-hura (cinta, pesta, dan buku) dan kondisi bangsa yang menghadapi berbagai ancaman dari dalam dan luar. Ketiga hal tersebut yang menggerakkan Lafran Pane untuk mendirikan HMI.

Citra keislaman, kemahasiswaan, dan keindonesiaan tersebut harus selalu hadir dalam diri generasi muda Islam. Kalau ditinjau secara umum permasalahan yang menjadi latar belakang sejarah berdirinya HMI. Situasi dunia internasional berbagai argumen telah diungkapkan sebab-sebab kemunduran umat Islam. Tetapi hanya satu hal yang mendekati kebenaran, yaitu bahwa kemunduran umat Islam diawali dengan kemunduran berpikir, bahkan sama sekali menutup kesempatan untuk berpikir. Yang jelas ketika umat Islam terlena dengan kebesaran dan keagungan masa lalu maka pada saat itu pula kemunduran menghinggapinya kita.

Akibat dari keterbelakangan umat Islam , maka munculah gerakan untuk menentang keterbatasan seseorang melaksanakan ajaran Islam secara benar dan utuh. Gerakan ini disebut Gerakan Pembaharuan. Gerakan Pembaharuan ini ingin mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang totalitas, dimana disadari oleh kelompok ini, bahwa Islam bukan hanya terbatas kepada hal-hal yang sakral saja, melainkan juga merupakan pola kehidupan manusia secara keseluruhan. Untuk itu sasaran Gerakan Pembaharuan atau reformasi adalah ingin mengembalikan ajaran Islam kepada proporsi yang sebenarnya, yang berpedoman kepada Al Qur'an dan Hadist Rassullulah SAW.

Dengan timbulnya ide pembaharuan itu, maka Gerakan Pembaharuan di dunia Islam bermunculan, seperti di Turki (1720), Mesir (1807). Begitu juga penganjurnya seperti Rifaah Badawi Ath Tahtawi (1801-1873), Muhammad Abduh (1849-1905), Muhammad Ibnu Abdul Wahab (Wahabisme) di Saudi Arabia (1703-1787), Sayyid Ahmad Khan di India (1817-1898), Muhammad Iqbal di Pakistan (1876-1938) dan lain-lain. Situasi NKRI Tahun 1596 Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Maka sejak itu pulalah Indonesia dijajah Belanda. Imprealisme Barat selama  $\pm$  350 tahun membawa paling tidak 3 (tiga) hal: Penjajahan itu sendiri dengan segala bentuk implikasinya. Missi dan Zending agama Kristiani. Peradaban Barat dengan ciri sekulerisme dan liberalisme.

Setelah melalui perjuangan secara terus menerus dan atas rahmat Allah SWT maka pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta Sang Dwi Tunggal Proklamasi atas nama bangsa Indonesia mengumandangkan kemerdekaannya. Kondisi Mikrobiologis Ummat Islam di Indonesia Kondisi ummat Islam sebelum



berdirinya HMI dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu : Pertama : Sebagian besar yang melakukan ajaran Islam itu hanya sebagai kewajiban yang diadakan seperti dalam upacara perkawinan, kematian serta kelahiran. Kedua : Golongan alim ulama dan pengikut-pengikutnya yang mengenal dan mempraktekkan ajaran Islam sesuai yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketiga : Golongan alim ulama dan pengikut-pengikutnya yang terpengaruh oleh mistikisme yang menyebabkan mereka berpendirian bahwa hidup ini adalah untuk kepentingan akhirat saja. Keempat : Golongan kecil yang mencoba menyesuaikan diri dengan kemajuan jaman, selaras dengan wujud dan hakekat agama Islam. Mereka berusaha supaya agama Islam itu benar-benar dapat dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia.

Dalam usia yang hampir menyamai Republik ini, HMI telah banyak berkiprah dalam pembangunan bangsa, jajaran alumninya banyak tersebar di mana-mana baik diparpol, cendikiawan, NGO/LSM, pemerintahan, agamawan, pengusaha, dll. Setelah melalui perjalanan waktu yang panjang dengan berbagai sejarah yang dijalaninya, maka keberadaan HMI semakin dituntut eksistensinya untuk dapat mengikuti perubahan masyarakat ditengah-tengah kehidupan yang kompleks dan dinamis saat ini, maka tujuan HMI kini ialah mewujudkan Insan Cinta yakni “Terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabdian, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Dandung Arifridho, Pengaruh Organisasi Kepemudaan HMI terhadap Partisipasi Politik Anggota HMI di Bandar Lampung, *Skripsi*, (Bandar Lampung :Universitas Bandar Lampung,2017)h.54

## 2. Visi dan Misi

### 1. Visi HMI yaitu :

Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah Taa'ala.

### 2. Misi HMI yaitu :

- a. Membina pribadi muslim untuk mencapai akhlaqul kharimah.
- b. Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya.
- c. Mempopulerkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan umat manusia.
- d. Memajukan kehidupan umat dalam mengawal Dinul Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- e. Memperkuat ukhuwah islamiyah sesama umat Islam sedunia.
- f. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kepemudaan untuk menopang pembangunan nasional.
- g. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan huruf (a) s.d (f) dan sesuai dengan azas, fungsi dan peran organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>58</sup>

### 3. Independensi Persfektif HMI

Watak independen HMI adalah sifat organisasi, maka implementasinya perlu diwujudkan dalam bentuk sikap-sikap sebagai penjabaran. Suatu sikap

---

<sup>58</sup> Situs resmi HMI, PbHmi.id diakses pada tanggal 17 Agustus 2018.

yang independen adalah sikap bebas di segala bidang dengan penuh kepercayaan pada diri sendiri untuk secara aktif membawakan misi HMI di dalam arena perjuangan. Sikap-sikap tersebut merupakan pencerminan dari watak/sikap asasi anggotanya sebagai insan perjuangan yang berstatus mahasiswa islam, berperan sebagai generasi muda bangsa yang berfungsi sebagai kader bangsa Indonesia.

Sikap-sikap tersebut secara keseluruhan adalah watak/sifat yang :

1. Cenderung pada kebenaran
2. Bebas, merdeka dan terbuka.
3. Objektif, rasional dan kritis.
4. Progresif dan dinamis.
5. Demokratis, jujur dan adil.

Karena itu dalam kehidupan nasional HMI secara organisasotris berpartisipasi aktif, konstruktif dan korektif dalam menghadapi masalah-masalah perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Perwujudan dari pengembangan independen ini bagi anggota terutama untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan adanya pengembangan dan pertumbuhan yang maksimal dari potensi kualitas pribadi anggota-anggota HMI. Sebaliknya menjag dan memelihara sifat independen HMI guna menopang pengembangan sifat peloporan, keberanian, dan kritis yang harus diperankan oleh HMI secara organisatoris.

Untuk itu, implementasi independen HMI kepada anggota adalah sebagai berikut :

1. Anggota-anggota HMI terutama aktivitas-aktifitasnya dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan organisasi serta membawa program perjuangan HMI. Karena itu mereka tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan dengan membawa nama organisasi atas kehendak pihak luar manapun juga.
2. Mereka tidak dibenarkan mengadakan komitmen-komitmen dalam bentuk apapun dengan pihak luar HMI selain segala sesuatu telah diputuskan secara organisatoris.
3. Alumnus HMI diharapkan untuk aktif berjuang meneruskan dan mengembangkan watak independen dimanapun mereka berada dan berfungsi sesuai dengan minat dan profesinya dalam rangka membawa misi HMI. Selain itu menganjurkan serta mendorong Alumni HMI untuk menyalurkan aspirasi politiknya lewat organisasi sarjana.  
Atau lewat partai-partai politik ataupun lewat lembaga-lembaga /badan-badan lainnya sesuai dengan minat dan profesinya.

Di dalam menjalankan garis independen HMI dengan ketentuan-ketentuan di atas, pertimbangan HMI semata-mata adalah untuk memelihara pengembangan anggota serta peranan HMI dalam rangka ikut bertanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Karenanya yang menjadi dasar dan kriteria setiap sikap HMI semata-mata adalah untuk menjaga kepentingan nasional. Bukan kepentingan satu golongan partai atau pihak penguasa sekalipun.

Bersikap independen berarti sanggup berpikir dan berbuat sendiri dengan menempuh resiko .Ini adalah suatu konsekuensi atau sikap pemuda/mahasiswa dan kritis terhadap masa kini dan kembali dirinya untuk sanggup mewarisi hari depan bangsa dan negara.<sup>59</sup>

#### 4. Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI sebagai Warisan Intelektual Cak Nur

Nilai dasar perjuangan HMI sangat identik dengan sosok Cak Nur meskipun Cak Nur merumuskan naskah NDP tidak sendiri, bersama Syakib Mahmud dan Endang Saifuddin Anshori, namun buah pikiran Cak Nur lebih mendominasi dalam naskah NDP ini.

Naskah NDP dibuat oleh Cak Nur saat menjadi Ketua Umum PB.HMI periode pertama (1966-1969).Setelah Cak Nur melakukan perjalanan ke Timur tengah yang menginspirasinya untuk membuat suatu tulisan yang dasar dan ideologi HMI naskah NDP disahkan pada kongres ke 9 di Malang pada tanggal 3-10 mei 1969 dan mengantarkan Cak Nur menjadi ketua Umum PB.HMI untuk kedua kalinya.

Dalam naskah NDP Bab 1 menjelaskan tentang dasar-dasar kepercayaan hidup yang benar dimulai dengan percaya atau iman kepada Allah Swt dan kecintaan kepadanya yaitu taqwa bukanlah nilai yang statis dan abstrak. Nilai-nilai itu memancar dengan sendirinya dalam bentuk kerja nyata bagi kemanusiaan dan amal soleh. Iman tidak memberi arti apa-apa bagi manusia jika tidak disertai dengan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang sungguh-sungguh untuk menegakkan perikehidupan yang benar dalam peradaban dan kebudayaan . Bab 1

---

<sup>59</sup> Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (1947-1975)*,h.174.

NDP ini sejalan dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila dalam sila pertama yang berbunyi “ketuhanan yang maha esa”.

Bab II NDP HMI membahas pengertian-pengertian dasar tentang Kemanusiaan, Iman dan takwa dipelihara dan diperkuat dengan melakukan ibadah atau pengabdian formil kepada Tuhan, ibadah mendidik individu agar tetap ingat dan taat kepada tuhan dan berpegang teguh kepada kebenaran sebagaimana dikehendaki oleh hati nurani yang hanif. Segala sesuatu yang menyangkut bentuk dan cara beribadah menjadi wewenang penuh daripada agama tanpa adanya hak manusia untuk mencampurinya. Ibadah-ibadah yang terus menerus kepada Tuhan menyadarkan manusia akan kedudukannya ditengah alam dan masyarakat dan sesamanya. Ia telah melebihi sehingga kepada kedudukan Tuhan dengan merugikan orang lain, dan tidak mengurangi kehormatan dirinya sebagai makhluk tertinggi dengan akibat perbudakan diri kepada alam maupun orang lain.

Bab III NDP HMI membahas tentang kemerdekaan manusia ( ikhtiar) dan keharusan universal (takdir). Kerja manusia atau amal shaleh mengambil bentuknya yang utama dalam usaha yang sungguh-sungguh secara esensial menyangkut kepentingan manusia secara keseluruhan baik dalam ukuran ruangan maupun waktu yang menegakkan keadilan dalam masyarakat sehingga setiap orang memperoleh harga diri dan martabatnya sebagai manusia. Hal itu berarti usaha-usaha yang terus menerus harus dilakukan guna mengalahkan masyarakat kepada nilai-nilai yang baik, lebih maju dan insani Usaha itu “*amar makruf*, disamping usaha lain untuk mencegah segala bentuk kejadian dan kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan dan nahi mungkar. Selanjutnya bentuk kerja kemanusiaan

yang lebih nyata ialah pembelaan kaum lemah, kaum tertindas dan kaum miskin pada umumnya serta usaha-usaha ke arah peningkatan nasib dan taraf hidup yang wajar dan layak sebagai manusia. Bab III ini sejalan dengan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab.

Bab IV NDP HMI membahas tentang ketuhan yang maha Esa dan kemanusiaan. Kesadaran dan rasa tanggung jawab yang besar kepada kemanusiaan melahirkan jihad, yaitu sikap berjuang. Berjuang itu dilakukan dan ditanggung bersama oleh manusia dalam bentuk gotong royong atas dasar kemanusiaan dan kecintaan kepada Tuhan. Perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan menuntut ketabahan, kesabaran, dan pengorbanan. Dan dengan jalan itulah kebajikan dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia. Oleh sebab itu, persyaratan bagi berhasilnya perjuangan adalah adanya barisan yang merupakan bangunan yang kokoh dan kuat. Mereka terikat satu sama lain oleh persaudaraan dan solidaritas yang tinggi dan oleh sikap yang tegas kepada musuh-musuh dari kemanusiaan tetapi justru demi kemanusiaan mereka adalah manusia yang toleran. Skalipun mengikuti jalan yang besar, mereka tidak memaksakan kepada orang lain atau golongan lain.

Bab V NDP HMI membahas tentang individu dan masyarakat. Individu atau manusia memiliki kemerdekaan pribadi, dan kemerdekaan pribadi itu adalah hak asasi yang pertama dan yang paling berharga. Manusia memiliki kemerdekaan pribadi setelah manusia bertauhid kepada Tuhan karena dengan bertauhid manusia bebas dari segala ketergantungan terhadap selain Tuhan. Karena ketergantungan kepada selain Tuhan itu syirik dan syirik adalah awal segala

kejahatan. Manusia hidup dalam suatu bentuk hubungan tertentu dengan dunia sekitarnya sebagai makhluk sosial. Untuk itu manusia merdeka harus juga menjaga kemerdekaan orang lain dalam masyarakat.

Bab VI membahas keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Kerja kemanusiaan atau Amal saleh itu merupakan proses perkembangan yang permanen. Perjuangan kemanusiaan berusaha mengarah kepada yang lebih baik, lebih benar. Oleh sebab itu manusia harus mengetahui arah yang benar daripada perkembangan di segala bidang. Dengan perkataan lain, manusia harus mendalami dan selalu mempergunakan ilmu pengetahuan. Kerja manusia dan kemanusiaan tanpa ilmu tidak akan mencapai tujuannya, sebaliknya ilmu tanpa rasa kemanusiaan tidak akan membawa kebahagiaan bahkan menghancurkan peradaban. Ilmu pengetahuan adalah karunia Tuhan yang besar artinya bagi manusia. Mendalami ilmu pengetahuan harus didasari oleh sikap terbuka. Mampu mengungkapkan perkembangan pemikiran tentang kehidupan peradaban dan budaya. Kemudian mengambil dan mengamalkan diantaranya yang terbaik. Sejalan dengan sila ke 5 dalam Pancasila yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam NDP terdapat banyak kesamaan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. HMI dengan NDP dan kualitas insan cita berusaha ikut aktif dalam pembangunan kader-kader penerus bangsa ini dengan semangat keislaman,



keindonesiaan, dan kemodernan. Dari NDP tugas kader HMI diserahkan menjadi beriman, berilmu, dan beramal.<sup>60</sup>

### 5. Profil HMI Cabang Gowa Raya

HMI cabang Gowa Raya didirikan pada 1989-1990, berbagai dinamika muncul setelah HMI Cabang gowa Raya terbentuk, terdapat beberapa figur penting dari terbentuknya HMI Cabang Gowa Raya, diantaranya adalah :

Tabel 4.1 Daftar Nama Figur Penting Terbentuknya HMI cabang Gowa Raya .<sup>61</sup>

No	Nama
1	Jamaluddin Bona
2	Juanda Abu Bakar
3	Syahrir
4	Misbahuddin
5	Tompo
6	Dr. Sabri AR

Sedangkan struktur Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya adalah sebagai berikut :<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Mughani Labib, Tradisi Intelektual HMI Cabang Ciputat 1960-1998 (Jakarta : Universitas Islam Syarif Hidayatullah,2015),h.46.

<sup>61</sup> Nurkholis Majid Datu, Mahasiswa, 8 Oktober, Makassar.

<sup>62</sup> Nurkholis Majid Datu, Mahasiswa, 8 Oktober, Makassar.

Tabel 4.2 Daftar Nama Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya

No	Nama
1	Gastan Maiwa
2	Syamsir Salam
3	Jamaluddin Syamsir
4	A.Muh.Yusuf Bakri
5	Alumnus Zainuddin
6	Multi Alim Malkap
7	Feri Harianto
8	Andi Jimmi Rusman

Berdasarkan Surat Keputusan Pegurus Besae Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) nomor 395/KPTS/A/05/1438 tentang pengesahan susunan pnegurusan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Gowa Raya periode 2017/2018.

Tabel 4.3 Susunan Pengurus HMI Cabang Gowa Raya periode 2017/2018

<b>KETUA UMUM</b>	Andi Jimmi Rusman
Ketua Bidang Pembinaan Anggota	Andi Andika Wirawan
Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi	Rifai Maulana
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda	Ardiansyah
Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi	Muhlis Budiman
Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah	Fachrurrozy Akmal
Ketua Bidang Pemberdayaan Umat	Zulkifli
Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	Arnil Firdansyah
Ketua Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Wardiman Hariyanto Namany
Ketua Bidang Sosial dan Politik	A.Latif
Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi	Rian Hidayat
Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Muzakkir

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan	Yuyun Uswatun
<b>SEKRETARIS UMUM</b>	<b>Fadli Ashadi</b>
Wakil Sekretaris Umum Bidang Pembinaan Anggota	Firman Rusyaid
Wakil Sekretaris Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi	Andi Muh.Syaiful Haj
Wakil Sekretaris Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda	Usman
Wakil Sekretaris Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi	Fadli Lesmana Kamil
Wakil Sekretaris Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah	Anas Fadli
Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Umat	Mustakim
Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	Suhardiman
Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Syah Munawar
Wakil Sekretaris Bidang Sosial dan Politik	Dedi Kusnadi Thamin
Wakil Sekretaris Bidang Informasi dan Komunikasi	Syamsul Bahri
Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Ardilla
Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan	Andi Winda Noviasary
<b>BENDAHARA UMUM</b>	<b>Muh.Rizal A.S</b>
Wakil Bendahara Umum Bidang Pembinaan Anggota	Aimul Yaqin
Wakil Bendahara Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi	Muh.Nurichsan
Wakil Bendahara Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda	LukmanHarsa Wardana
Wakil Bendahara Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi	Ilham Ashari Zaid
Wakil Bendahara Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah	Imran Basri
Wakil Bendahara Bidang Pemberdayaan Umat	Muh.Ibnu Munzir
Wakil Bendahara Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	Ahkam Abu Bakar
Wakil Bendahara Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Arifin Akbar
Wakil Bendahara Bidang Sosial dan Politik	Dede Porwadin
Wakil Bendahara Bidang Informasi dan Komunikasi	Syukur

Wakil Bendahara Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Rahman Hidayat
Wakil Bendahara Bidang Pemberdayaan Perempuan	Salmiyah
<b>DEPARTEMEN-DEPARTEMEN</b>	
Departemen Pengembangan Organisasi	
Koordinator	Ade Rizal Ahmad
Anggota	Muh.Ilham Syarifuddin
	Rahmat Setyawan
Departemen Perintisan Perguruan Tinggi Excelent	
Koordinator	Andi Faisal
Anggota	Dedy Faisal Suwahyu
	Murdianto
Departemen Pengkajian Data dan Informasi	
Koordinator	Nasrullah
Anggota	Sardin Alkabin
	Dirwansyah Darmin
Departemen Diklat Anggota	
Koordinator	Abdul Gafur Hanna
Anggota	Hamid Fahriza
	Ahmad Fadli
	Ariadi R
Departemen Pengembangan dan Promosi Kader	
Koordinator	Hidayatul Rahmat
Anggota	Muh.Nauval Maldi
	Nasrullah
Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan	
Koordinator	Abdul Raiz Rahman
Anggota	Arisman Saputra
	Kadaruddin
	Aswar Darwis
Departemen Kepemudaan	
Koordinator	Muh.Akbar
Anggota	Muh.Nazrul Hak
	Erwin
	Indra Saputra

<b>Departemen Pengolahan Sumber Dana</b>	
Koordinator	Harsa Wardana
Anggota	Hijrah Abdullah
	Khalifah Husaifa
<b>Departemen Pemberdayaan Perempuan</b>	
Koordinator	Winda Syharly Basir
Anggota	Marlina P
	Armawaati
	Rozan Albaiduri

***B. Bentuk Afiliasi Kader HMI Cabang Gowa Raya di Partai Politik Sulawesi Selatan.***

Bentuk afiliasi kader HMI Cabang Gowa Raya ditentukan dari motivasi kader dalam melakukan aktivitas politiknya, bentuk afiliasi yang terjadi didasari oleh motivasi yang beragam, Hal-hal yang memotivasi seseorang adalah : pertama kebutuhan prestasi, berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar, bergulat untuk sukses. Kedua, kebutuhan kekuasaan yaitu kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara yang orang itu (tanpa dipaksa) tidak akan berperilaku demikian dan ketiga yaitu kebutuhan afiliasi yaitu hasrat untuk hubungan antar-pribadi yang ramah dan akrab.<sup>63</sup> Ketiga hal tersebut kadang ditemukan dilapangan.

**1. Afiliasi Informal Kader HMI Cabang Gowa Raya dengan Partai Politik**

Dalam praktik berorganisasi yang dijalankan oleh HMI Cabang Gowa Raya tidak terdapat afiliasi yang secara jelas melibatkan kader HMI dengan partai politik tertentu, Secara institusional peneliti tidak menemukan bukti kongkrit yang

---

<sup>63</sup> Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 162

melibatkan HMI Cabang Gowa Raya dalam menjalin kesepakatan tertentu yang menuntun HMI Cabang Gowa Raya untuk mengambil tindakan dan berpihak pada Keputusan politik tertentu. Hal tersebut sesuai dengan kutipan informan berikut :

*“kalau secara kelembagaan Parpol dan HMI tidak boleh berafiliasi namun secara personal, itu sah-sah saja”<sup>64</sup>*

Kutipan wawancara tersebut memberikan penilaian terhadap afiliasi informal yang melibatkan kader HMI dengan Partai politik tertentu adalah sebuah hal yang lumrah, sebab secara individual bebas menentukan sikap. Selain hal tersebut terdapat pula komentar dari informan lain tentang kebebasan kader dalam menentukan pilihan dan tindakan politik mereka.

*“HMI boleh membangun relasi dengan siapa saja, apalagi berafiliasi dengan partai politik selagi bukan lembaganya kalau secara person itu sah-sah saja”<sup>65</sup>*

Kutipan informan ini juga seperti dengan kutipan informan sebelumnya yang memberikan kesempatan kepada individu untuk membangun relasi termasuk kepada partai politik. Untuk mengetahui praktik afiliasi informal maka dapat dianalisa dengan melihat landasan dari afiliasi tersebut yaitu yang berlandaskan pada senioritas dan berlandaskan pada orientasi HMI itu sendiri.

Dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka fenomena Afiliasi Informal yang terjalin semakin dapat dilihat sebagai konsekuensi keberadaan HMI dan partai politik pada kepentingan yang sama.

---

<sup>64</sup>Muhammad Ridwan Budiman, (Politisi PAN) , “Wawancara”Pemenangan Prof Andalan , 20 Juli 2018.

<sup>65</sup>Eko Novianto (Politisi Partai Gerindra Kabupaten Jeneponto), “Wawancara”di Sekretariat Partai Gerindra Kabupaten Jeneponto, 21 Juli 2018

a. Landasan Senioritas

Afiliasi Informal yang terjalin antara kader HMI dengan Partai Politik adalah disebabkan oleh adanya landasan senioritas, hal tersebut didasarkan pada relasi yang telah terjalin antara kader HMI dengan alumni HMI yang telah terlebih dahulu terjun ke partai politik, partai politik ini tidak satu melainkan relatif pada berbagai partai politik yang ditempati oleh senior-senior HMI bernaung.

Menurut peneliti, landasan Senioritas ini merupakan penerapan dari adanya hubungan patron klien yang melibatkan hubungan antara junior dan senior. Termasuk dalam hal penentuan orientasi politik dan pilihan politik. Hal tersebut sebagaimana kutipan informan dibawah :

*“kita sebagai senior selalu memberikan support dan motivasi kepada adik untuk terus menciptakan kader-kader yang kritis dan berkompoten.”<sup>66</sup>*

Selain itu, Informan lain menceritakan tentang dinamika HMI dan keterlibatan senior di partai Politik, seperti kutipan informan berikut :

*“dulu pada tahun 2015 sebelum Anas Urbaningrum tersandung kasus korupsi, Partai Demokrat sangat dilirik oleh Parpol karena kader-kader HMI memiliki intelektual yang bagus, Contoh lain , Golkar bisa kita lihat hampir mirip dengan pola perpolitikan yang ada di HMI, Anas mencoba untuk seperti itu kader-kader HMI digiring ke Demokrat tetapi hal itu cut oleh SBY kalau dilihat bagaimana anak-anak HMI dalam pergolakan partai politik hari ini, sederhana bahwa hampir beberapa parpol sangat tertarik melibatkan anak-anak HMI untuk mengatur sistem kepartaiannya atau bagaimana alur-alur kebijakannya.”<sup>67</sup>*

Dua kutipan tersebut memberikan informasi bahwa afiliasi informal yang terjadi dengan landasan senioritas terjadi secara tidak kaku dan tidak terikat oleh

---

<sup>66</sup> Eko Novianto (Politisi Partai Gerindra Kabupaten Jeneponto), “Wawancara” di Sekretariat Partai Gerindra Kabupaten Jeneponto, 21 Juli 2018 .

<sup>67</sup> Galib Alydrus ( Politisi Partai Solidaritas Indonesia), Wawancara”Makassar, 23 Juli 2018.

aturan tertentu melainkan sesuai dengan dinamika organisasi dan pusran kepentingan politik yang ada. Seperti pada kutipan informan berikut :

*“sebagai senior yang dapat saya lakukan adalah merekrut kader-kader yang memiliki potensi untuk aktualisasi untuk kebaikan.”<sup>68</sup>*

Kutipan tersebut semakin memperjelas fenomena afiliasi tersebut sebagai sebuah afiliasi informal yang cenderung terjalin disebabkan oleh adanya ikatan senioritas. Fenomena tersebut merupakan realisasi dari praktik patron-klien sebab hubungan antara senior dan yunior tidak dapat begitu saja terjadi melainkan situasi tersebut harus diciptakan apabila seseorang ingin mempunyai relasi tertentu dengan pihak lain maka dia perlu memberikan sesuatu terlebih dahulu dan jika pihak lain bersedia maka pemberian tersebut akan dibalas.<sup>69</sup> dalam praktik afiliasi informal ini, senior memberikan sesuatu berupa rekrutmen terhadap kader HMI untuk bergabung di partai politik.

Fenomena afiliasi informal tersebut memperjelas bahwa afiliasi informal tersebut berhubungan dengan relasi patron-klien yaitu ,suatu kasus khusus hubungan antara dua orang, yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental, yaitu seseorang dengan status ekonomi lebih tinggi (*patron*) menggunakan pengaruh dan sumber daya untuk memberikan perlindungan dan/atau keuntungan kepada seseorang dengan status lebih rendah (*client*) yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan dukungan dan bantuan, termasuk jasa pribadi kepada *patron*. Namun perbedaannya adalah senior tersebut

---

<sup>68</sup>Eko Novianto (Politisi Partai Gerindra Kabupaten Jeneponto), “Wawancara” di Sekretariat Partai Gerindra Kabupaten Jeneponto, 21 Juli 2018 .

<sup>69</sup>Heddy Shri Ahimsa Putra, *Patron Klien di Sulsel*, (Yogyakarta : Kepel Pres,2007)h.11



memiliki kecenderungan lebih mengandalkan ikatan emosional dalam praktik politiknya.

Praktik tersebut merupakan jenis relasi keatas yang diharapkan oleh para kader HMI cabang Gowa Raya. Jenis relasi keatas ini dapat diartikan sebagai bertemunya mereka kedalam kekuatan politik yang memang diporsikan oleh partai politik, maka para aktivis mahasiswa memiliki keuntungan jaringan ke tingkat yang lebih elit. Aktivitas politik yang melibatkan kader HMI dan partai politik dengan beberapa cara yaitu :

1. *Lobbying*, yaitu mencakup upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi Keputusan-keputusan mereka mengenai persolan-persoalan yang meyangkut sejumlah besar orang.<sup>70</sup> Lobbying ini dilalukan oleh kader HMI Cabang Gowa Raya dalam menjalankan berbagai program kerja yang telah disepakati, untuk memanfaatkan keberadaan senior (Kahmi) di jajaran pemerintahan dilakukan lobbying, bahkan aktivitas lobby ini berlangsung 2 arah yaitu, pihak pejabat atau pemimpin politik melakukan lobby apabila terdapat kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak senior mereka.
2. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengembangan Keputusan pemerintah.<sup>71</sup> Cara yang kedua ini hampir sama dengan cara sebelumnya namun keberadaan kader di HMI

---

<sup>70</sup> Damsar, *Pengantar Sosilogi Politik*, h.189

<sup>71</sup> Damsar, *Pengantar Sosilogi Politik*, h.189

cabang Gowa Raya menyebabkan mereka menerapkan atau terlibat dalam konsep partisipasi politik.

3. Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.<sup>72</sup> Dalam konteks HMI Cabang Gowa Raya dan Partai Politik menjalin interaksi sebab keberadaan kader HMI Cabang Gowa Raya di berbagai partai politik di Sulawesi Selatan merupakan pintu gerbang bagi kader-kader HMI untuk menjalin afiliasi informal sehingga tujuan untuk mencari koneksi terpenuhi.

#### b. Landasan Orientasi HMI

Dinamika organisasi HMI Cabang Gowa Raya yang melibatkan kader HMI cabang Gowa Raya untuk terjun ke partai politik menurut peneliti tidak lepas dari adanya orientasi HMI yang mendorong Alumnus HMI untuk berjuang meneruskan dan mengembangkan watak independen dimanapun mereka berada dan berfungsi sesuai dengan minat dan profesinya dalam rangka membawa misi HMI. Selain itu HMI juga menganjurkan serta mendorong Alumni HMI untuk menyalurkan aspirasi politiknya lewat organisasi sarjana. Atau lewat partai-partai politik ataupun lewat lembaga-lembaga / badan-badan lainnya sesuai dengan minat dan profesinya.

Melihat misi HMI tersebut, dapat disimpulkan bahwa orientasi HMI turut mendukung kader untuk terjun ke partai politik guna membawa misi HMI

---

<sup>72</sup> Damsar, *Pangantar Sosiologi Politik*, h.189.

termasuk pada ranah politik maupun pada misi lainnya. Seperti pada kutipan vinforman berikut :

*“saya ingin terjun ke partai politik karena semangat aktualisasi apa-apa yang telah saya dapatkan di HMI kemarin.”<sup>73</sup>*

Dengan demikian berdirinya HMI tidak lepas dari teori organisasi yang berbunyi tentang penyebab berdirinya organisasi disebabkan oleh alasan sosial (*social reasons*) alasan mendirikan organisasi didasarkan pada kebutuhan manusia untuk bergaul dan berkomunikasi dengan manusia lainnya. Organisasi menjadi sarana bersosialisasi dan bekerja dengan hubungan yang baik dengan sesama manusia.

Semangat aktualisasi yang merupakan motivasi kader untuk terjun ke partai politik merupakan pintu gerbang terjalannya afiliasi informal yang melibatkan kader dengan partai politik tertentu. Selain itu salah satu informan juga mengatakan bahwa :

*“saya fikir relasi bagus jadi HMI ini adalah jembatan untuk meraih apa yang kita inginkan dan pencirian jati diri ada di HMI karena pengembangan potensi untuk jadi politikus, ulama dan lain-lain.”<sup>74</sup>*

Selain itu, terdapat pula :

*“kita di HMI sudah menjadi tradisi saling membesarkan antara satu sama lain”<sup>75</sup>*

Kutipan informan tersebut memberikan keterangan bahwa HMI bukanlah sekedar organisasi semata melainkan sebagai organisasi kader, kondisi tersebut membuat HMI sebagai wadah yang memiliki orientasi untuk mencetak kader yang

---

<sup>73</sup>Muhammad Ridwan Budiman, (Politisi PAN) , “Wawancara”Pemenangan Prof Andalan , 20 Juli 2018.

<sup>74</sup> Galib Alydrus ( Politisi Partai Solidaritas Indonesia), Wawancara”Makassar, 23 Juli 2018.

<sup>75</sup>Muhammad Ridwan Budiman, (Politisi PAN) , “Wawancara”Pemenangan Prof Andalan , 20 Juli 2018.

tidak buta politik dan senantiasa peka dengan masalah Kebangsaan. Afiliasi informal yang terjalin menyebabkan HMI Cabang Gowa Raya sebagai wadah yang turut mendukung kadernya untuk turut serta dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan politik. Meskipun secara kelembagaan HMI Cabang Gowa Raya dituntut untuk menjaga independensi.

## 2. Pemetaan Persepsi Afiliasi Informal Kader HMI Cabang Gowa Raya Berdasarkan Ideologi Partai

Pola afiliasi informal yang melibatkan kader HMI cabang Gowa Raya dari perspektif ideologi partai politik yaitu terbagi menjadi dua jenis yaitu : partai religius dan partai nasionalis. Latar belakang HMI yang berasaskan Islam tidak serta merta menyebabkan kadernya stagnan pada partai yang berasaskan islam saja melainkan terdapat pula kader yang memilih terjun ke partai politik yang bersifat nasionalis.

Haluan ideologi jelas sangat mempengaruhi arah politik kader dalam memposisikan diri mereka dalam ranah politik baik pengambilan Keputusan, pembuatan regulasi serta pola interaksi dengan masyarakat atau konstituennya.

### a. Persepsi Kader yang terjun dalam Partai Politik berideologi Islam

Afiliasi informal yang terjalin antara kader HMI Cabang Gowa Raya dengan kader yang terjun dipartai politik tidak terlepas dari doktrin islam sebab Islam merupakan bukan sekedar agama saja melainkan merambah di berbagai sektor termasuk politik, sebagaimana kutipan informan berikut :

*“menurut saya HMI perlu berafiliasi dengan partai politik terutama yang berideologi Islam, partai tersebut misalnya Partai PPP, Partai PKS,*

*senan dengan demikian maka dapat terjalin hubungan dan bersinergi dengan program-program yang sama-sama berbasis islam.”<sup>76</sup>*

Kutipan informan diatas memperjelas bahwa kader menghendaki terjalinnya afiliasi dengan mengutamakan partai yang memiliki latar belakang ajaran agama silam sebab Islam tidak bisa dipisahkan dari nafas perjuangan HMI Cabang Gowa Raya. Dalam hal keikutsertaan kader HMI Cabang Gowa Raya, , mereka tersebar di berbagai partai politik yang berasakan islam, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4. Partai Politik Berideologi Islam yang diikuti oleh Kader HMI Cabang Gowa Raya berdasarkan Ideologi Islam.

No	Nama	Partai Politik
1	Mursidin ST.	PPP
2	Ridwan budiman, ST.	PAN
3	Resky Silfana Amir	PAN
4	Muhammad Risal	PKS
5	Nurhidayah	PKB

Deretan kader yang terlibat di Partai Politik yang berideologi Islam tersebut meyakini bahwa keberadaan mereka di partai politik yang berasakan islam merupakan manifestasi dari upaya mereka untuk mengaplikasikan spirit Islam pada sektor politik.Seperti kutipan informan berikut :

<sup>76</sup> Mursidin, “Wawancara” Ketua PAC PPP Kec.Turatea Kab.Jeneponto, Mursidin, 19 Juli 2018.

*“saya rasa HMI haruslah berafiliasi dengan partai Islam mengingat HMI adalah lembaga yang berasaskan Islam.”<sup>77</sup>*

Meskipun informan tersebut berasal dari Partau Gerindra yang cenderung memiliki haluan nasionalis namun pendapat informan tersebut justru menggambarkan penitngnya HMI untuk berafiliasi dengan partai Islam yang merupakan konsekuensi dari kemiripan misi HMI dengan partai-partai Islam tersebut.

b. Persepsi Kader yang terjun dalam Partai Politik berideologi Nasionalis

Pandangan kader yang terjun dalam partai Politik berideologi Nasionalis ini tidak mempermasalahkan kesesuaian antara HMI yang notabene berasaskan Islam dan partai yang berideologi Islam, hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh informan berikut :

*“sejauh ini kader-kader HMI menyebar diberbagai partai politikjadi tidak ada batasan-batasan mau di partai manapun yang jelas ada berpegang teguh komitmen Kebangsaan dan komitmen keislaman, komitmen peneraan nilai-nilai dasar perjuangan agar tercapainya tujuan HMI, masyarakat yang adil, masyarakat yang makmur dan diridhai oleh Allah Swt dan tidak mesti ke partai politik tertentu sebab lebih banyak warna lebih bagus karena HMI diperhitungkan dari situnya yang tidak moton hanya pada satu partai saja ”<sup>78</sup>*

Tabel 4.5 Partai Politik yang diikuti oleh Kader HMI cabang Gowa Raya

No	Nama	Partai Politik
1	Mursidin ST.	PPP
2	Ridwan budiman, ST.	PAN

<sup>77</sup> Eko Novianto (Politisi Partai Gerindra Kabupaten Jeneponto), “Wawancara”di Sekretariat Partai Gerindra Kabupaten Jeneponto, 21 Juli 2018 .

<sup>78</sup> Takwa Bahar, “Wawancara”Politisi Partai Golkar Kabupaten Selayar, Makassar, 23 Juli 2018.

### ***C. Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Kader HMI Cabang Gowa Raya untuk Bergabung di Partai Politik***

Keterlibatan Alumni HMI di ranah politik baik dalam skala nasional maupun skala daerah bukan lagi hal yang baru, konstalasi politik yang dinamis menyebabkan kader HMI tersebar di berbagai partai politik, baik partai yang berideologi nasionalis maupun religius. Keikutsertaan Kader HMI Gowa Raya dalam kepengurusan partai politik merupakan sebuah tantangan bagi kader untuk memperjuangkan nilai-nilai dasar perjuangan yang telah diajarkan kepada mereka.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, keikutsertaan Kader HMI untuk terjun kepartai politik merupakan hal yang lumrah namun HMI cabang Gowa Raya tidak mengarahkan kader ke partai politik tertentu namun diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. Oleh karna itu, pembahasan ini dilihat dari sudut pada personal kader, bukan dari sudut pandang. Tiap-tiap kader memperlihatkan motif yang berbeda-beda, berikut motif tersebut.

#### 1. Insentif Material

Pada motif material, terdapat 3 aspek yang merepresentasikan dorongan seseorang untuk terlibat di partai politik, yaitu motif mencari perlindungan (*patronage*), menjadi pejabat yang dipilih (*elected Office*) dan naik pangkat/memperoleh kedudukan yang lebih tinggi. Kehadiran kader-kader HMI Cabang Gowa Raya dalam partai politik tersubstitusikan melalui motif ini.

Realitas dilapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kader yang masuk dalam kategori ini, seperti kutipan informan berikut :

*“membangun relasi dengan partai politik kalau alumni HMI berdasarkan fakta politik karna aluni-alumni HMI tersebar diberbagai partai jadi cara berkomunikasi tidak eksklusif, komunikasi terbuka karena sama-sama HMI, jadi segala kepentingan itu berbeda tetapi tujuan kita tetap sama(tarik menarik”<sup>79</sup>.*

Mencermati kutipan informan tersebut disimpulkan bahwa keterlibatan kader HMI Cabang Gowa Raya di partai politik untuk membangun relasi dengan mempertimbangkan kesamaan latar belakang organisasi (HMI) sebagai basis untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Kepentingan tersebut dapat berupa *reward*, baik berupa proyek, jabatan/kekuasaan tertentu. Pertimbangan untuk menarik kader-kader di partai politik merupakan kewajaran yang normatif dalam tradisi ilmu politik, fenomena tarik menarik kader tersebut biasanya dikenal dengan istilah pilihan rasional (*rational choice*).

Pilihan rasional tersebut dipandang sebagai sesuatu yang memberi keuntungan yang diperoleh ketika seseorang ikut dalam berpartisipasi politik.<sup>80</sup> Alasan pilihan rasional inilah yang melandasi kader HMI terjun dalam partai politik, sebab bergabungnya kader HMI ke partai politik dengan mengharapkan kepentingannya terakomdir maka terdapatlah pertukaran kepentingan yang dilandasi oleh kesamaan organisasi.

Selain pilihan rasional, perspektif yang lain juga relevan untuk menilai terjun kader HMI di partai politik, yaitu dengan perspektif tersebut adalah ketika

---

<sup>79</sup>Takwa Bahar, “Wawancara”Politisi Partai Golkar Kabupaten Selayar, Makassar, 23 Juli 2018.

<sup>80</sup> Reski Yanti Nurdin, Pemuda dan Politik ( Studi tentang Partisipasi Politik Pemuda menjadi Anggota Legislatif di DPRD kota Makassar Periode 2009-2014),h.17



aktivitas politik dianggap dapat memenuhi kebutuhan material atau immaterial bagi kehidupannya. Aktor merupakan makhluk yang rasional dengan mempertimbangkan untung dan rugi bila melakukan suatu transaksi pertukaran (aktivitas) politik. Transaksi politik melalui keterlibatan seseorang dalam aktivitas politik, tidak akan terjadi manakala aktor yang terlibat tidak memperoleh sesuatu. Keuntungan yang diperoleh bisa saja berupa perhatian, pengayoman, dukungan, atau bisa juga bersifat materi seperti uang.<sup>81</sup> Hal tersebut menurut peneliti adalah akumulasi dari istilah kepentingan. Terkait hal kepentingan, terdapat pula kader HMI Cabang Gowa Raya yang memilih terjun ke Partai Politik disebabkan oleh faktor kepentingan umat. Sebagaimana kutipan informan berikut :

*“Perlu untuk bergabung di partai politik guna membangun relasi untuk kepentingan umat”<sup>82</sup>*

Kepentingan umat dalam konsep ini tetap saja sebagai sebuah bentuk insentif, dalam insentif diklasifikasikan menjadi 2 yaitu insentif positif dan negatif, dengan menambahkan terminologi umat dalam kepentingan, tetap saja insentif didasarkan kepada anggapan bahwa manusia normal mendasarkan hidup dan kegiatannya berdasarkan *“Quid Pro Quo* (ada ubi ada talas) dengan artian bahwa seseorang didorong oleh suatu kepentingan atau suatu pamrih yang ingin ia puaskan.

Hal tersebut dilandasi pada anggapan bahwa gerakan mahasiswa bukan hanya terpusat pada gerakan moral saja, melainkan harus turut terlibat aktif dalam gerakan politik yang ada demi terwujudnya perubahan dalam tatanan sosial secara

---

<sup>81</sup> Damsar, *Sosiologi Politik*.h.193.

<sup>82</sup> Mursalin, (Ketua PAC Kec.Turatea Kabupaten Jeneponto), “Wawancara”Jeneponto, 19 Juli 2018.

dinamis. Jika mahasiswa mengambil perannya pada kekuatan politik, peran mahasiswa tak ubahnya sebagai seorang politisi secara utuh. Memang ini bukan sesuatu yang salah, namun kecenderungan yang terlalu kuat pada paradigma kekuasaan akan memudahkan konsentrasi untuk membangun organisasi sesuai dengan tujuan semula. Posisi inilah yang dirisaukan pelbagai pihak, jika gerakan mahasiswa berubah menjadi gerakan politik, boleh jadi mereka terjebak oleh *vested interest* rezim yang sedang berkuasa.

## 2. Insentif Solidaritas.

Keikutsertaan kader HMI Cabang Gowa Raya dalam partai politik pada motif ini didasari oleh pemenuhan kebutuhan individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Terdapat beberapa kader HMI cabang Gowa Raya yang terjun di partai politik dengan menjadikan partai politik sebagai ajang untuk mengaktualisasikan dirinya. Sebagaimana kutipan informan berikut :

*“Bergabungnya saya di Partai politik untuk mengaktualisasikan apa-apa yang telah saya dapatkan di HMI kemarin.”<sup>83</sup>*

Dari kutipan informan tersebut dapat diketahui motif kader HMI akan mengejar kekuasaan untuk membarikan pengaruh kepada orang lain, untuk menunjukkan eksistensi dan aktualisasi dirinya. Selain alasan tersebut dapat pula diketahui bahwa motif ini didasari oleh adanya kesamaan relasi yang terbangun antara 1 kader dengan kader lain, seperti menurut informan berikut :

*“Terkadang adek-adek HMI yang masih kebal saya terkadang canggung, dan kadang ada beberapa kader yang meiminta untuk masuk di partai*

---

<sup>83</sup>Muhammad Ridwan Budiman, (Politisi PAN) , “Wawancara”Pemenangan Prof Andalan , 20 Juli 2018.

*saya hari ini, ada juga yang meminta kerja sama untuk program kegiatan mereka*”<sup>84</sup>

Fenomena tersebut menyebabkan HMI sebagai kelompok strategis yang memproduksi kader-kader secara otomatis akan membentuk sebuah jaringan *epistemic Community* yang terkoneksi oleh karena adanya kesamaan gagasan, ide, visi dan misi perjuangan serta tidak terpengaruh oleh perbedaan budaya, aliran tertentu dan sebagainya dimanapun mereka berada. Hal tersebut juga dapat ditemui pada kutipan informan berikut :

*“Kita di HMI sudah menjadi tradisi saling membesarkan satu sama lain” yang dapat saya lakukan untuk HMI adalah merekrut kader-kader yang memiliki potensi untuk aktualisasi untuk kebaikan*”<sup>85</sup>

Mencermati kutipan informasi tersebut dapat diketahui bahwa motif kader HMI untuk bergabung di partai politik karna adanya dorongan untuk aktualisasi diri, dan solidaritas kolektif kader mengingat peran HMI sebagai organisasi pengkaderan yang memiliki pondasi nilai ideologis, nilai politis dan nilai ideologis. Ketiga nilai tersebut dilihat sebagai konsekuensi kader HMI untuk terjun ke partai politik.

### 3. Insentif Idealisme.

Kader HMI yang bergabung di partai politik didasari oleh motif ideologi yaitu mereka yang memiliki gagasan politik tertentu biasanya akan berusaha untuk mengaktualisasikan gagasan tersebut ke dalam kegiatan politik. Kader yang teridentifikasi pada motif ini ingin mencapai tujuan bukan untuk kepentingan

---

<sup>84</sup>Muhammad Ridwan Budiman, (Politisi PAN) , “Wawancara” Sekeretriat Tim Pemenangan Prof Andalan , 20 Juli 2018.

<sup>85</sup>Muhammad Ridwan Budiman, (Politisi PAN) , “Wawancara” Sekeretriat Tim Pemenangan Prof Andalan , 20 Juli 2018.

pribadi saja, namun untuk meraih kepenitngan masyarakat luas. Untuk mewujudkannya maka kader HMI tersebut memilih terjun ke partai politik agar dapat memperjuangkan gagasan mereka dari dalam sistem. Hal ini didasari oleh kutipan informan berikut :

*“Bergabungnya saya di partai politik karna ingin mewujudkan insan cita HMI, untuk merubah sistem , maka kita harus masuk ke dalam sistem tersebut”<sup>86</sup>.*

Motif yang melatar belakangi informan tersebut untuk terjun di Partai politik merupakan akumulasi dari nilai ideologis HMI melalui Nilai-nilai dasar perjuangan (NDP), selain itu nilai politis HMI tercantum dalam tujuan HMI yang berkeinginan untuk menciptakan insan cita yang memiliki kesadaran *rabbaniah* yang siap menjadi pemimpin sekaligus mengemban misi profetik untuk terus melakukan perubahan, pembaharuan, pembangunan dan pencerahan dalam kehidupan bagi umat dan bangsa.<sup>87</sup> Motif ideologi merupakan motif yang ideal bagi keikitsertaan kader dalam partai politik, sebab pada motif ini tindakan kader ditentukan oleh niat yang baik, sebagaimana kutipan informan berikut :

*“saya masuk di partai politik karna menyalurkan minat dibidang politik praktis, dengan begitu saya bisa masuk sebagai anggota parlemen, untuk mengurus pemerintahan dan mewujudkan ide-ide saya soal pembangunan bangsa, negara maupun lokal ( baik itu di level provinsi/kabupaten dan kota).”<sup>88</sup>*

Kutipan informan tersebut sesuai dengan esensi motif idealisme yang didasari pada kecenderungan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ideal/ideologi

---

<sup>86</sup> Galib Alydrus ( Politisi Partai Solidaritas Indonesia), Wawancara”Makassar, 23 Juli 2018.

<sup>87</sup> Ahmad Nasir Siregar, Manifesto Poltiik HMI, (Jakarta : Padepokan Salemba,2010) h.27

<sup>88</sup> Eko Novianto (Politisi Partai Gerindra Kabupaten Jenepono), “Wawancara”di Sekretariat Partai Gerindra Kabupaten Jenepono, 21 Juli 2018 .

dalam kehidupan di masyarakat atau menjadi bukti bahwa dorongan pribadi individu secara sadar untuk berpolitik yaitu untuk memperjuangkan ideologinya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

1. Bentuk Afiliasi Kader HMI Cabang Gowa Raya di Partai Politik Sulawesi Selatan yaitu berupa pola afiliasi informal sebab dalam praktik berorganisasi yang dijalankan oleh HMI Cabang Gowa Raya tidak terdapat afiliasi yang secara jelas melibatkan kader HMI dengan partai politik tertentu, Secara institusional peneliti tidak menemukan bukti kongkrit yang melibatkan HMI Cabang Gowa Raya dalam menjalin kesepakatan tertentu yang menuntun HMI Cabang Gowa Raya untuk mengambil tindakan dan berpihak pada Keputusan politik tertentu.

Fenomena Afiliasi Informal yang terjalin dilihat sebagai konsekuensi keberadaan HMI dan partai politik pada kepentingan yang sama. Afiliasi informal ini terjadi disebabkan oleh 2 landasan, yaitu landasan Senioritas dan Landasan Orientasi HMI.

2. Faktor-faktor yang melatar belakangi Kader HMI Cabang Gowa Raya untuk bergabung di Partai Politik yaitu : (a) Faktor Insentif Material, keterlibatan kader HMI Cabang Gowa Raya di partai politik untuk membangun relasi dengan mempertimbangkan kesamaan latar belakang organisasi (HMI) sebagai basis untuk memperjuangkan kepentingan mereka, (b) Faktor Insentif Solidaritas yaitu motif ini didasari oleh pemenuhan kebutuhan individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Terdapat beberapa kader HMI cabang Gowa Raya yang terjun di

3. partai politik dengan menjadikan partai politik sebagai ajang untuk mengaktualisasikan dirinya.(c) Motif ideologi yaitu mereka yang memiliki gagasan politik tertentu biasanya akan berusaha untuk mengaktualisasikan gagasan tersebut ke dalam kegiatan politik. Kader yang teridentifikasi pada motif ini ingin mencapai tujuan bukan untuk kepentingan pribadi saja, namun untuk meraih kepenitngan masyarakat luas. Untuk mewujudkannya maka kader HMI tersebut memilih terjun ke partai politik agar dapat memperjuangkan gagasan mereka dari dalam sistem.

### ***B. Implikasi***

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang terkait dalam skripsi yaitu : Kader HMI, Alumni HMI serta Partai Politik untuk melakukan sinergi agar cita-cita HMI dan Partai Politik dapat berjalan dengan maksimal dan dapat diaktualisasikan. Kehadiran HMI juga diharapkan mampu menyuplai kader yang berkualitas di Partai Politik sehingga dengan berbekal pada wawasan dan ilmu yang telah diperoleh selama berproses di HMI dapat lebih bermanfaat. Selain itu Partai Politik juga mestinya mengakomodir keberadaan Kader HMI sebagai bukti terjadinya proses rekrutmen yang memperhatikan kualitas personil partai bukan hanya pada dasar materi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alquran dan Terjemahannya , Kementrian Agama ( Bandung: Jabal,2010)
- Akmal Taringan Azhari, *Islam Mazhab HMI*,(Jakarta: Kultura,2007).
- \_\_\_\_\_ , *Islam Universal: Kontekstualisasi NDP HMI Dalam Kehidupan Beragama Di Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media,2003).
- Arifridho Dandung, Pengaruh Organisasi Kepemudaan HMI Terhadap Partisipasi Politik Anggota HMI Di Bandar Lampung,2017)
- Alamsyah Anggraini, Analisa Penyebab Perubahan Organisasi Di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,Laporan Penelitian ( Makassar:UIN Alauddin Makassar,2014).
- Al-Widyatama Dan Veronika Sudiati, *Dasar-Dasar Menulis Karya Ilmiah* (Jakarta: Gramedia Widiasarma Indonesia, 1997).
- Creswell John W, *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*(Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2012).
- Hefni Moh , *Patron-Client Relationship* Pada Masyarakat Madura, *Jurnal* (Karsa, Vol. XV No. 1 April 2009).
- Istiqlal Aryundha,“Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa”, *Skripsi*, (Makassar:Ilmu Politik Dan Pemerintahan,Universitas Hasanuddin,2015).
- Labib Mughani, Tradisi Intelektual HMI Cabang Ciputat 1960-1998 (Jakarta : Universitas Islam Syarif Hidayatullah,2015).
- Karim M.Rusli. *HMI MPO Dalam Kemelut Modernisasi Politik Di Indonesia*, Bandung: Mizan).
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1990).
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Remaja Rosdakarya, 1996).
- Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2010).



- Muniruddin Said, *Bintang Arasy, Tafsir Filosofis-Gnostik Tujuan HMI* (Syiah Kuala University Pres).
- Muhammad Alfian Alfian Mahyu, *Menjadi Pemimpin Politik*, ( Jakarta:Gramedia Pustaka,2009).
- Muliansyah, *Political, ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik dan Welfare State*, (Jakarta : Litera, 2014).
- Muhadjir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996).
- Nasrudin Al Albani Muhammad, *Sahih Al Jami' Al-Shagir Wa Ziyadatuhu*, (Al\_Maktab Al-Islami, 1988, Cet.III).
- PB HMI, *Hasil-Hasil Kongres XXV 2006*, Makassar: Tanpa Penerbit, 2006..
- Pelras Christian, '*Hubungan Patron Klien Pada Masyarakat Bugis Dan Makassar Di Sulawesi Selatan*' Dalam *Kuasa Dan Usaha Di Masyarakat Sulawesi Selatan*, Roger Tol Dkk (Ed.)(Jakarta: Innawa-KITLV,2009).
- Sitompul Agussalim, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (1947-1975)*, (Mizaka Galiza: Yogyakarta,1975).
- Sitompul Agussalim, *Pemikiran Keislaman Dan Keindonesiaan HMI: Menyatu Dengan Umat Menyatu Dengan Bangsa*, (Yogyakarta: Misaka Galiza.2008).
- Solichin , *HMI Candradimuka Mahasiswa*,( Jakarta:Sinergi Persadatama Foundation, 2010).
- Shri Ahimsa Putra Heddy, *Patron Klien di Sulsel*, (Yogyakarta : Kepel Pres,2007).
- Scott James C. 1972, "*Patron Client, Politics And Political Change In South East Asia*" Dalam *The American Political Science Review. Vol. 66, No. 1 (Mar., 1972)*.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D* ( Bandung:CV.Afabeta,2008).
- Tim Penyusun, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Media Centre,2012)
- Winardi, *Teori Organisasi Dan Pengorganisasian*, (Rajawali Press, Jakarta,2014).

# Lampiran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

### Lampiran 1. Daftar Informan

No	Nama	Pekerjaan/Jabatan	Waktu dan Tempat Wawancara
1	Mursidin ST	Ketusa PAC Kec.Turatea Kab.Jeneponto / Partai PPP	Mursidin, 19 Juli 2018.
2	Muh.Ridwan Budiman,SE	Politisi PAN	Jeneponto, 20 Juli 2018.
3	Eko Novinato,ST	DPC Partai Gerindra Kab.Jeneponto	Jeneponto, 21 Juli 2018
4	Galib Alydrus,S.IP.	Wakil Ketua DPW Bidang Politik, Mantan Sekretaris Umum HMI Cab.Gowa Raya, Mantan Ketua Komisariat Ushuluddin	Makassar,23 Juli 2018
5	Resky Silfina Amir,S.Sos.	Sekretaris Bidang Kepemudaaan PAN Sul-Sel Mantan pengurus Kohati Komisariat Ushuluddin dan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar	Makassar,24 Juli 2018
6	Taqwa Bahar	Pengurus Partai Golkar	Makassar, 23 Juli 2018
7	Asrullah Dimas	Pengurus HMI cabang Gowa Raya	Gowa,24 Juli 2018
8	Akhkam	Pengurus HMI cabang Gowa Raya	Kampus UIN Alauddin Makassar,24 Juli 2018.
9			

M A K A S S A R

## **Lampiran 2. Daftar Pertanyaan**

### **Afiliasi**

1. Bagaimana pendapat anda tentang kondisi HMI cabang Gowa Raya saat ini?
2. Menurut anda bagaimana pentingnya independensi HMI ditengah pusaran problem sosial hari ini?
3. Bagaimana menurut anda tentang realisasi dari penerapan NDP HMI bagi alumni yang telah berproses di HMI?
4. Menurut anda bagaimana potret HMI saat ini ditengah pusaran kepentingan partai politik?
5. Bagaimana semestinya HMI membentengi independesinya terhadap kepentingan elit-elit penguasa?
6. Menurut anda apakah HMI perlu berafiliasi dengan partai politik tertentu?
7. Jika HMI berafiliasi dengan partai politik tertentu, partai pa yang paling ideal?
8. Bagaimana semestinya sikap Kahmi dalam mengawal efektivitas program HMI hari ini?
9. Menurut anda, bagaimana HMI agar bisa lebih baik kedepannya?

### **Faktor-Faktor**

1. Menurut anda bagaimana mestinya kader HMI saat membangun relasi dengan partai politik?
2. Menurut anda ketika anda bergabung dalam partai politik, apa saja motivasi anda?
3. Menurut anda apa yang dapat anda lakukan di partai politik yang berkaitan dengan kepentingan HMI?
4. Ketika anda terjun di partai politik , bagaimana anda menerapkan NDP HMI?
5. Ketika anda terjun di partai politik, hal apa yang menjadi tantangan bagi anda?
6. Menurut anda bagaimana semestinya kader HMI ketika terdapat program HMI yang tidak selaras dengan sikap partai yang anda ikuti?
7. Menurut anda sampai di mana HMI dan partai politik dapat membangun relasi?
8. Bagaimana bentuk dukungan partai anda terhadap keberadaan ormas seperti HMI?
9. Menurut anda apakah hal utama yang membedakan HMI dan partai politik?
10. Menurut anda, bagaimana mestinya sikap alumni HMI dalam membina kader HMI?

### Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara dengan Mursidin ST Ketua PAC Kec. Turatea Kab. Jeneponto / Partai PPP pernah menjadi Kader HMI cabang Gowa raya.



2. Wawancara dengan Takwa Bahar (Politisi Partai Golkar Selayar)



3. Wawancara dengan Galib Alydrus,S.IP. selaku Wakil Ketua DPW Bidang Politik, Mantan Sekretaris Umum HMI Cab.Gowa Raya, Mantan Ketua Komisariat Ushuluddin



4. Wawancara dengan Eko Novinato,ST , DPC Partai Gerindra Kab.Jeneponto



5. Wawancara dengan Asrullah Dimas selaku Pengurus HMI cabang Gowa Raya



6. Wawancara dengan Ahkam Pengurus HMI Cabang Gowa Raya



7. Wawancara dengan Ahkam Pengurus HMI Cabang Gowa Raya



8. Baliho beberapa kader HMI yang terjun ke Partai politik.





## Daftar Riwayat Hidup



Nama Dedi Kusnadi Thamin lahir di Ganrang Batu Kabupaten Jeneponto tanggal 22 Oktober 1992 merupakan anak dari pasangan Haeruddin dan Ibu Supiati merupakan anak ke 4 dari 4 bersaudara, Jenjang Pendidikan SD Inpres Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, dan melanjutkan MTS Ganrang Batu Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, SMA Negeri 1 Kelara Kecamatan Tolo' Kabupaten Jeneponto, dan melanjutkan Pendidikan di UIN Alauddin Makassar jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dan menyelesaikan Studi pada tahun 2018, pengalaman Organisasi Intra maupun Ekstra Kampus pernah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu politik (HMJ) periode 2013-2014, Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat periode 2014-2015, Sekertaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Komisariat Ushuluddin dan Filsafat periode 2014-2015 M, Wasekum Bidang Sosial dan Politik Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Gowa Raya periode 2017-2018 M, pengurus Badan Kordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Sul-selbar periode 2018-2019 M, Dewan Penasehat Sanggar Seni SIPAKATAU Kabupaten Jeneponto, dan salah satu pendiri Gerakan Mahasiswa politik (GMP) Sulawesi Selatan.